



INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN  
TIM SINERGI BADAN KEAHLIAN  
SETJEN DPR RI

# KEGIATAN

## Masa Reses III Tahun Sidang 2024-2025 (28 Mei – 23 Juni 2025)

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN  
DIKELOLA OLEH:

TIM SINERGI ANTARA BADAN KEAHLIAN, PARA KABAG SET AKD DEPUTI PERSIDANGAN, DAN TENAGA AHLI AKD.



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
KEPALA BADAN KEAHLIAN

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.

## DAFTAR ISI

<b>KOMISI I</b> .....	<b>1</b>
A. FUNGSI LEGISLASI .....	1
B. FUNGSI ANGGARAN .....	1
C. FUNGSI PENGAWASAN .....	1
<b>KOMISI II</b> .....	<b>2</b>
A. FUNGSI LEGISLASI .....	2
B. FUNGSI ANGGARAN .....	2
C. FUNGSI PENGAWASAN .....	2
<b>KOMISI III</b> .....	<b>3</b>
A. FUNGSI LEGISLASI .....	3
B. FUNGSI ANGGARAN .....	4
C. FUNGSI PENGAWASAN .....	4
<b>KOMISI IV</b> .....	<b>7</b>
A. FUNGSI LEGISLASI .....	7
B. FUNGSI ANGGARAN .....	7
C. FUNGSI PENGAWASAN .....	7

<b>KOMISI V</b> .....	<b>11</b>
A. FUNGSI LEGISLASI .....	11
B. FUNGSI ANGGARAN .....	11
C. FUNGSI PENGAWASAN .....	11
<b>KOMISI VI</b> .....	<b>12</b>
A. FUNGSI LEGISLASI .....	12
B. FUNGSI ANGGARAN .....	12
C. FUNGSI PENGAWASAN .....	12
<b>KOMISI VII</b> .....	<b>14</b>
A. FUNGSI LEGISLASI .....	14
B. FUNGSI ANGGARAN .....	14
C. FUNGSI PENGAWASAN .....	14
<b>KOMISI VIII</b> .....	<b>16</b>
A. FUNGSI LEGISLASI .....	16
B. FUNGSI ANGGARAN .....	16
C. FUNGSI PENGAWASAN .....	16
<b>KOMISI IX</b> .....	<b>22</b>
A. FUNGSI LEGISLASI .....	22

B. FUNGSI ANGGARAN .....	22
C. FUNGSI PENGAWASAN .....	22
<b>KOMISI X .....</b>	<b>23</b>
A. FUNGSI LEGISLASI .....	23
B. FUNGSI ANGGARAN .....	23
C. FUNGSI PENGAWASAN .....	23
<b>KOMISI XI .....</b>	<b>28</b>
A. FUNGSI LEGISLASI .....	28
B. FUNGSI ANGGARAN .....	28
C. FUNGSI PENGAWASAN .....	28
<b>KOMISI XII .....</b>	<b>37</b>
A. FUNGSI LEGISLASI .....	37
B. FUNGSI ANGGARAN .....	37
C. FUNGSI PENGAWASAN .....	37
<b>KOMISI XIII .....</b>	<b>38</b>
A. FUNGSI LEGISLASI .....	38
B. FUNGSI ANGGARAN .....	38
C. FUNGSI PENGAWASAN .....	38

<b>BADAN LEGISLASI .....</b>	<b>47</b>
<b>BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN .....</b>	<b>49</b>
<b>MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN .....</b>	<b>63</b>
<b>BADAN URUSAN RUMAH TANGGA .....</b>	<b>64</b>
<b>BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA .....</b>	<b>65</b>
<b>BADAN ASPIRASI MASYARAKAT .....</b>	<b>67</b>

## LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI I

### A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

### B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

### C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	<b>Kementerian Pertahanan/Panglima TNI</b>	Kunjungan Kerja Reses dilaksanakan pada tanggal 28 Mei – 1 Juni 2025.	Pembahasan isu-isu strategis (Tertutup).	
2.	<b>BIN</b>	Kunjungan Kerja Reses dilaksanakan pada tanggal 28 Mei – 1 Juni 2025.	Pembahasan isu-isu strategis (Tertutup).	
3.	<b>Kemkomdigi</b>	Kunjungan Kerja Reses dilaksanakan pada tanggal 28 Mei – 1 Juni 2025.	Pembahasan isu-isu aktual.	

## LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI II

### A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

### B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

### C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	a. <b>Pemerintah Daerah</b> b. <b>Kanwil BPN</b>	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; dan/atau c. Kebijakan pemerintah.  Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI pada Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024 – 2024 ke Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Kepulauan Riau, pada tanggal 28 Mei – 1 Juni 2025.	Pada Kunjungan kali ini Komisi II DPR RI melakukan pengawasan terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam aspek pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), serta pelaksanaan Reforma Agraria dan Tata Ruang.	

## LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI III

### A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	<b>Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana</b>	Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III DPR RI tanggal 17 Juni 2025 dengan: 1. Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) 2. Ketua Harian Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI)	Masukan terhadap Penyusunan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).	--
2.		Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III DPR RI tanggal 18 Juni 2025 dengan: 1. Akademisi Program Pascasarja Universitas Borobudur 2. Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia (PB SEMMI) 3. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trisakti (USAKTI) 4. Komunitas Advokat Pengawal RUU KUHAP	Masukan terhadap Penyusunan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).	
3.		Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III DPR RI tanggal 19 Juni 2025 dengan: 1. Prof. Dr. Andi Muhammad Asrun., S.H., M.H. 2. Dr. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H. 3. Dr. Chairul Huda, S.H., M.H.	Masukan terhadap Penyusunan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).	
4.		Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III DPR RI tanggal 19 Juni 2025 dengan: 1. Lembaga Kajian Keilmuan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LK2 FH UI) 2. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Lampung (BEM U KBM UNILA) 3. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Bandar Lampung (UBL)	Masukan terhadap Penyusunan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).	

**B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN**

-

**C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN**

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	1. <b>Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Bengkulu</b> 2. <b>Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Bengkulu</b> 3. <b>Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bengkulu</b>	Kunjungan kerja spesifik Komisi III DPR RI ke Provinsi Bengkulu pada tanggal 28 Mei s.d 1 Juni 2025 dalam rangka fungsi Pengawasan.	Kunjungan kerja ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: 1. Komisi III DPR RI menerima penjelasan terkait pencapaian maupun kendala yang dihadapi dan terus mendukung peningkatan kualitas kinerja Polda, Kejaksaan Tinggi, dan BNNP Bengkulu yang masih membutuhkan dukungan anggaran maupun dukungan sarana dan prasarana lainnya untuk pemenuhan sumber daya organisasi. 2. Komisi III DPR RI meminta seluruh Mitra Kerja di Provinsi Bengkulu untuk tetap mengedepankan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, peningkatan profesionalisme dan akuntabilitas kerja, serta peningkatan kualitas dan kecepatan layanan publik pada masing-masing tugas dan fungsi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; untuk meningkatkan tingkat kepercayaan dan kepuasan masyarakat. 3. Komisi III DPR RI meminta agar kerja sama dalam bentuk koordinasi, kolaborasi, dan berbagai kegiatan bersama dapat terus ditingkatkan baik di dalam maupun luar instansi, baik dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu maupun instansi lainnya untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas kerja yang terarah dan profesional.	
2.	1. <b>Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Barat</b> 2. <b>Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumatera Barat</b>	Kunjungan kerja spesifik Komisi III DPR RI ke Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 28 Mei s.d 1	Kunjungan kerja ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: 1. Komisi III DPR RI telah menerima penjelasan terkait capaian dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kinerja Mitra Kerja Komisi III DPR RI di Provinsi Sumatera Barat, serta	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
	3. <b>Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Barat</b>	Juni 2025 dalam rangka fungsi Pengawasan.	<p>mendukung pengajuan usulan kebutuhan anggaran yang telah disampaikan.</p> <p>2. Komisi III DPR RI mengapresiasi tindak pencegahan kejahatan yang sudah tepat dilakukan oleh Mitra Kerja Komisi III DPR RI di Provinsi Sumatera Barat dan mengharapkan adanya peningkatan yang semakin baik untuk ke depannya.</p> <p>3. Komisi III DPR RI mengharapkan Mitra Kerja Komisi III DPR RI di Provinsi Sumatera Barat untuk tetap mewaspadai sekecil apapun bentuk kasus narkoba yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat. Komisi III DPR RI mengharapkan Mitra Kerja Komisi III DPR RI di Provinsi Sumatera Barat untuk dapat menerapkan Keadilan Restoratif secara optimal dalam penyelesaian penanganan perkara dengan melakukan persamaan pemahaman persepsi terkait Keadilan Restoratif.</p>	
3.	1. <b>Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Maluku</b> 2. <b>Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Maluku</b> 3. <b>Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Maluku</b>	Kunjungan kerja spesifik Komisi III DPR RI ke Provinsi Maluku pada tanggal 28 Mei s.d 1 Juni 2025 dalam rangka fungsi Pengawasan.	<p>Kunjungan kerja ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:</p> <p>1. Komisi III DPR RI telah menerima penjelasan terkait capaian dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kinerja Mitra Kerja Komisi III DPR RI di Provinsi Maluku, serta mendukung pengajuan usulan kebutuhan anggaran yang telah disampaikan.</p> <p>2. Komisi III DPR RI mengapresiasi tindak pencegahan kejahatan yang sudah tepat dilakukan oleh Mitra Kerja Komisi III DPR RI di Provinsi Maluku dan mengharapkan adanya peningkatan yang semakin baik untuk ke depannya.</p> <p>3. Komisi III DPR RI mengharapkan Mitra Kerja Komisi III DPR RI di Provinsi Maluku untuk tetap mewaspadai sekecil apapun bentuk kasus narkoba yang terjadi di Provinsi Maluku.</p> <p>4. Laporan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pimpinan dalam mengambil keputusan.</p>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
4.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum RI</b></li> <li>2. <b>Inspektur Wilayah II Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia</b></li> <li>3. <b>Koalisi Advokat Pemantau Peradilan</b></li> </ol>	<p>RDP dan RDPU Komisi III DPR RI dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2025 dengan agenda Menerima pengaduan masyarakat terkait kasus tergugat yaitu penyanyi dan pelaku pertunjukan yang telah menggunakan lagu "Bilang Saja" secara komersial tanpa ijin pencipta lagu.</p>	<p>Rapat ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komisi III DPR RI meminta kepada Bawas MA untuk menindaklanjuti laporan yang disampaikan oleh Koalisi Advokat Pemantau Peradilan terkait dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Prilaku Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara dengan Register No. 92/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2024/PN Niaga Jakarta Pusat, yang diduga pemeriksaan dan putusnya tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</li> <li>2. Komisi III DPR RI meminta kepada Mahkamah Agung untuk membuat Surat Edaran terkait panduan atau pedoman untuk penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan ketentuan terkait Hak kekayaan Intelektual lainnya secara komprehensif, sehingga tidak ada lagi putusan yang tidak mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, serta merugikan orkestrasi dunia seni dan musik Indonesia.</li> <li>3. Komisi III DPR RI meminta kepada Direktorat Jenderal Hak kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk dapat mensosialisasikan secara luas terhadap semua pihak terkait dengan mekanisme perolehan lisensi, pengelolaan royalti dilakukan melalui LMK/LMKN, dan pemahaman terhadap filosofi dan tujuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan ketentuan perundang-undangan terkait, sehingga tidak ada lagi sengketa/gugatan/putusan peradilan yang dapat merugikan seluruh artis atau pelaku industri musik Indonesia seperti dalam perkara No. 92/PDT. Sus-HKI/Hak Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst dan menimbulkan ketidakpastian hukum.</li> </ol>	

## LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI IV

### A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

### B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

### C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO.	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Walikota Batam;</li> <li>2. Kepala BP Batam;</li> <li>3. Dirjen Tanaman Pangan, Kementan;</li> <li>4. Dirjen PSDKP, Kementerian KP;</li> <li>5. Dirjen Penataan Ruang Laut, Kementerian KP;</li> <li>6. Dirjen PDASRH, Kementerian Kehutanan;</li> <li>7. Dirjen Planologi Kehutanan, Kementerian Kehutanan;</li> <li>8. Kepala Badan Karantina Indonesia;</li> <li>9. Kepala Badan Pangan Nasional;</li> <li>10. Direksi Perum BULOG;</li> <li>11. Direksi PT Pupuk Indonesia (Persero);</li> <li>12. Direksi PT Rajawali Nusantara</li> </ol>	<p>Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI Masa Sidang III Tahun Sidang 2024-2025 ke Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan pada tanggal 19-23 Juni 2025.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peninjauan Fasilitas PSDKP di Kantor PSDKP Batam dan Diskusi dengan tema “Memperkuat Pilar Maritim Indonesia Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan UU <i>Fishing</i> Di Wilayah Perairan Indonesia”;</li> <li>2. Kegiatan penanaman mangrove secara simblok Bersama LSM Akar Bumi Indonesia dan Peninjauan serta diskusi mengenai rehabilitasi mangrove di Provinsi Kepulauan Riau;</li> <li>3. Meninjau sarana prasarana Pertanian Kelas I Batam dilanjutkan dengan diskusi.</li> </ol>	

NO.	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
	<p><b>Indonesia/Holding Pangan/ID FOOD;</b></p> <p>13. <b>Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;</b></p> <p>14. <b>Kepala Dinas Kelautan Perikanan Prov. Kepri;</b></p> <p>15. <b>Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Prov. Kepri</b></p> <p>16. <b>LSM Akar Bumi Indonesia</b></p>			
2.	<p>1. <b>Menteri Kehutanan;</b></p> <p>2. <b>Gubernur Sumatera Barat;</b></p> <p>3. <b>Bupati Lima Puluh Kota;</b></p> <p>4. <b>Sekretaris Jenderal sekaligus Plt. Dirjen Perhutanan Sosial, Kementerian Kehutanan;</b></p> <p>5. <b>Walikota Padang;</b></p> <p>6. <b>Dirjen Tanaman Pangan, Kementan;</b></p> <p>7. <b>Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementan;</b></p> <p>8. <b>Dirjen Konservasi SDA dan Ekosistem, Kemenhut;</b></p> <p>9. <b>Kepala Badan Penyuluh dan Pengembangan SDM, KKP;</b></p> <p>10. <b>Kepala Badan Pangan Nasional;</b></p> <p>11. <b>Kepala Badan Karantina Indonesia;</b></p> <p>12. <b>Direksi Perum BULOG;</b></p> <p>13. <b>Direksi PT Pupuk Indonesia (Persero);</b></p>	<p>Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI Masa Sidang III Tahun Sidang 2024-2025 ke Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan pada tanggal 19-23 Juni 2025.</p>	<p>1. Pertemuan dan Diskusi di Kantor Gubernur Sumatera Barat;</p> <p>2. Meninjau Panen Padi di Kabupaten Agam;</p> <p>3. Kegiatan pembukaan “Gelar Karya: Festival &amp; Expo KUPS” di Lembah Harau Akabarayun”;</p> <p>4. Meninjau Taman Margasatwa dan Budaya Kinantan Kebun Binatan Kota Bukittinggi.</p>	

NO.	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
	<ul style="list-style-type: none"> <li>14. <b>Direksi ID FOOD;</b></li> <li>15. <b>Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Barat;</b></li> <li>16. <b>Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar;</b></li> <li>17. <b>Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi;</b></li> <li>18. <b>Kepala UPT Kementerian Kehutanan se-Sumatera Barat; dan</b></li> <li>19. <b>Satgas Pangan Provinsi Sumatera Barat</b></li> </ul>			
3.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Gubernur Provinsi Riau;</b></li> <li>2. <b>Bupati Kampar;</b></li> <li>3. <b>Walikota Pekanbaru;</b></li> <li>4. <b>Dirjen Perikanan Budi Daya, Kementerian KP;</b></li> <li>5. <b>Dirjen Penguatan Daya Saing KP, Kementerian KP;</b></li> <li>6. <b>Dirjen Penegakan Hukum Kehutanan, Kemenhut;</b></li> <li>7. <b>Direktur Pengelolaan Kawasan Konservasi, Ditjen KSDAE, Kemenhut;</b></li> <li>8. <b>Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, Kementerian KP;</b></li> <li>9. <b>Direksi Perum BULOG</b></li> <li>10. <b>Direksi PIHC;</b></li> </ul>	<p>Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI Masa Sidang III Tahun Sidang 2024-2025 ke Provinsi Riau dilaksanakan pada tanggal 19-23 Juni 2025.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Peninjauan dan Diskusi di Kampung Pati “Penguatan Sentra Budidaya Ikan di Daerah sebagai Pilar Swasembada Pangan Nasional;</li> <li>2. Diskusi di Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPPSDM) Kehutanan Wilayah II Pekanbaru membahas Tindak Lanjut Penertiban Kawasan Hutan di Taman Nasional Tesso Nilo;</li> <li>3. Kunjungan dan Diskusi di Gudang BULOG Pekanbaru, membahas Pelaksanaan Program Ketahanan Pangan di Provinsi Riau.</li> </ul>	

NO.	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
	11. <b>Direksi PT RNI/<i> Holding Pangan/ID FOOD;</i></b> 12. <b>Dirut Perikanan Indonesia/ID FOOD;</b> 13. <b>Kepala Dinas Ketahanan Pangan Prov.Riau</b> 14. <b>Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Riau;</b> 15. <b>Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Riau;</b> 16. <b>Satgas Garuda Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan;</b> 17. <b>Satgas Penertiban Kawasan Hutan Provinsi Riau;</b> 18. <b>Pembudidaya/Gapoktan</b>			

## LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI V

### A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

### B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

### C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	<ul style="list-style-type: none"><li>1. <b>Kementerian Pekerjaan Umum;</b><ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Dirjen Bina Marga</b></li><li>- <b>Dirjen SDA</b></li></ul></li><li>2. <b>Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;</b></li><li>3. <b>Kementerian Perhubungan;</b><ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Dirjen Perhubungan Laut</b></li><li>- <b>Dirjen Perhubungan Darat</b></li><li>- <b>Dirjen Perhubungan Udara</b></li><li>- <b>Pelindo</b></li><li>- <b>API</b></li><li>- <b>Pelni</b></li></ul></li><li>4. <b>Kementerian Desa dan PDTI;</b></li><li>5. <b>Kementerian Transmigrasi;</b></li><li>6. <b>BMKG;</b></li><li>7. <b>BNPP/Basarnas.</b></li></ul>	<p>Kunjungan Reses dilaksanakan pada tanggal 19 s.d 23 Juni 2025:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1. Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Ketapang;</li><li>2. Provinsi Riau;</li><li>3. Provinsi Sulawesi Tenggara.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>1. Peninjauan Bandara Rahadi Oesman, Kab. Ketapang dan sarana prasarana di Desa Sungai Palang Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat.</li><li>2. Peninjauan Pelabuhan Pantoloan dan Jembatan Palu IV, Provinsi Sulawesi Tengah.</li><li>3. Peninjauan Stadion Riau, Jalan Tol Pekanbaru Dumai dan jalan Lingkar Parit Kota Dumai, Provinsi Pekanbaru.</li></ul>	

## LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI VI

### A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO.	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	<b>RUU tentang Perlindungan Konsumen</b>	Kunker Luar Negeri dilaksanakan tanggal 9 s.d. 15 Juni 2025.	Kunjungan luar negeri panja penyusunan naskah akademik dan rancangan undang-undang tentang perlindungan konsumen Komisi VI DPR RI ke negara Jepang.	

### B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

### C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Eselon 1 Kementerian BUMN</b></li> <li>2. <b>PT Pupuk Indonesia</b></li> <li>3. <b>PT Pupuk Kaltim</b></li> </ol> <p><b>Dan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>PT Pertamina Hulu Energi (PHE)</b></li> <li>2. <b>PT Pertamina Hulu Mahakam</b></li> <li>3. <b>PT PLN (Persero)</b></li> <li>4. <b>Telkomsel</b></li> <li>5. <b>PT Peln (Persero)</b></li> </ol>	Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI Masa Sidang III Tahun sidang 2024 - 2025 ke Provinsi Kalimantan Timur dilaksanakan tanggal 18 Juni s.d 22 Juni 2025	<p>Pengembangan Sektor Industri Pupuk Dalam Rangka Mendukung Ketahanan Pangan Nasional.</p> <p>Dan</p> <p>Pembahasan Strategi Pengembangan Ketahanan Energi Nasional serta Modernisasi Transportasi Laut.</p>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
2.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Eselon I Kementerian BUMN</b></li> <li>2. <b>PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) /InJourney</b></li> <li>3. <b>PT Pengembangan Pariwisata Indonesia/ITDC</b></li> <li>4. <b>InJourney Airport / AP</b></li> <li>5. <b>PT Garuda Indonesia</b></li> <li>6. <b>PT Hotel Indonesia Natour (HIN)</b></li> </ol> <p><b>Dan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Eselon 1 Kementerian BUMN</b></li> <li>2. <b>PT Pertamina Patra Niaga</b></li> <li>3. <b>PT Perusahaan Gas Negara</b></li> </ol>	<p>Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI Masa Sidang III Tahun sidang 2024 - 2025 ke Provinsi Nusa Tenggara Barat dilaksanakan tanggal 18 Juni s.d 22 Juni 2025.</p>	<p>Evaluasi Operasional Kawasan Ekonomi Khusus "Mandalika" dan Pengembangan Sektor Pariwisata di Provinsi NTB.</p> <p>Dan</p> <p>Pembahasan Ketahanan Energi di Provinsi NTB dan Sekitarnya.</p>	
3.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Eselon I Kementerian BUMN</b></li> <li>2. <b>PT Bukit Asam</b></li> <li>3. <b>PT Indonesia Asahan Aluminium</b></li> </ol> <p><b>Dan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Eselon I Kementerian BUMN</b></li> <li>2. <b>Bank BNI</b></li> <li>3. <b>Bank BRI</b></li> <li>4. <b>Bank Mandiri</b></li> <li>5. <b>Bank BTN</b></li> </ol>	<p>Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI Masa Sidang III Tahun sidang 2024 - 2025 ke Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dilaksanakan tanggal 19 Juni s.d 23 Juni 2025.</p>	<p>Pembahasan Kinerja Pertambangan Batubara dan Pengolahan Alumunium di Pulau Sumatera beserta Strategi Minimalisasi Dampak Lingkungan, Ekonomi dan Sosial.</p> <p>Dan</p> <p>Pembahasan Strategi Mengatasi Kondisi Ekonomi Global serta Dukungan Perbankan Khususnya di Provinsi Sumatera Selatan.</p>	

## LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI VII

### A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

### B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

### C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO.	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	<b>Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI ke :</b> 4. <b>Provinsi Papua Barat Daya</b> 5. <b>Provinsi Maluku</b> 6. <b>Provinsi Kalimantan Utara</b>	Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI ke Provinsi Papua Barat Daya dilaksanakan pada tanggal 28 Mei-1 Juni 2025, Provinsi Maluku pada tanggal 11 Juni - 15 Juni 2025 dan Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 19 Juni – 23 Juni 2025.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI ke Provinsi Papua Barat Daya mendorong optimalisasi pembangunan sarana dan prasarana pariwisata, termasuk infrastruktur pendukung seperti <i>mooring</i> dan akses transportasi laut, serta kolaborasi Pemerintah dan <i>stakeholder</i> terkait dalam menjaga ekosistem sehingga dapat meminimalisir dampak negatif aktivitas pertambangan terhadap sektor pariwisata dan ekosistem laut yang rentan.</li><li>2. Kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI ke Provinsi Maluku memberikan wawasan yang komprehensif mengenai kondisi aktual pelaksanaan kebijakan industri dan ekonomi kreatif di wilayah Timur Indonesia. Kota Ambon dan Provinsi Maluku memiliki potensi luar biasa, namun memerlukan dukungan kebijakan yang inklusif, partisipatif, dan berbasis kebutuhan daerah. Tindak lanjut dari kunjungan ini melalui: Advokasi penguatan kebijakan sektoral, penyusunan regulasi pendukung, dan</li></ol>	

NO.	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>pengawasan alokasi anggaran afirmatif untuk wilayah kepulauan.</p> <p>3. Kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI ke Provinsi Kalimantan Utara <b>mendorong pemerintah</b> pusat dan daerah untuk segera menindaklanjuti permasalahan tata kelola kawasan industri, penyediaan air baku, dan pelibatan tenaga kerja lokal di kawasan KIH. Koordinasi lintas sektor, penyederhanaan perizinan, serta penyusunan peta jalan pembangunan kawasan perlu diprioritaskan agar manfaat industri benar-benar dirasakan oleh masyarakat Kalimantan Utara. <b>Menekankan</b> perlunya intervensi kebijakan untuk mempercepat penguatan UMKM dan industri kecil menengah (IKM) di Kalimantan Utara. Program seperti fasilitasi legalitas usaha, pelatihan desain dan kemasan, sertifikasi halal dan BPOM, hingga UKM <i>Go Export</i> perlu diperluas cakupannya dan disesuaikan dengan karakteristik daerah perbatasan. <b>Mendorong</b> revitalisasi lembaga penyiaran publik seperti TVRI dan RRI di Kaltara melalui peningkatan jangkauan siaran, penguatan konten lokal yang mencerminkan identitas daerah, serta pelatihan SDM penyiaran. Media publik memiliki peran strategis dalam memperkuat literasi pembangunan, promosi potensi lokal, dan penyebaran informasi kepada masyarakat di wilayah 3T.</p>	

## LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI VIII

### A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

### B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

### C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO.	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Kunjungan Kerja Reses	Kunjungan Kerja Reses ke Provinsi Bali dilaksanakan pada tanggal 28 Mei – 1 Juni 2025.	Dalam kunjungan tersebut memberikan beberapa Temuan dan Rekomendasi: <b>A. Temuan</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Komisi VIII DPR RI mengapresiasi penyaluran bantuan sosial dan keagamaan dari mitra-mitra Komisi VIII DPR RI kepada penerima manfaat di Provinsi Sulawesi Utara,</li><li>2. Sarana-prasarana di Sentra Tumou Tuo Manado yang akan digunakan untuk penyelenggaraan Sekolah Rakyat (SR) yang akan dimulai pada bulan Juli 2025, baik untuk ruang kelas maupun asrama siswa, masih dalam proses renovasi, belum selesai.</li><li>3. Calon siswa yang akan menempuh pendidikan di SR Manado masih dalam proses seleksi dengan persyaratan berasal dari keluarga miskin.</li></ol>	

NO.	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Terdapat kewenangan antara Kementerian Sosial RI dan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Kementerian Sosial RI menangani yang di luar panti, sedang yang di dalam panti ditangani oleh Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara.</li> <li>5. Provinsi Sulawesi Utara membutuhkan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap korban bencana letusan Gunung Ruang dan meluapnya Danau Tondano.</li> <li>6. DAK Non Fisik untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dialokasikan untuk Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tidak lebih banyak dari DAK Non Fisik yang dialokasikan untuk kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara.</li> <li>7. Pimpinan Baznas Provinsi Sulawesi Utara tidak mendapat gaji, demikian Baznas Provinsi Sulawesi Utara belum mendapat bantuan operasional dari APBD. Sama seperti Baznas, BWI belum mendapat bantuan operasional dari APBD.</li> <li>8. IAKN Manado dan IAIN Manado membutuhkan peningkatan status menjadi UAKN Manado dan UIN Manado sehingga lebih optimala dalam pengelolaan proses perkuliahan, pengabdian kepada masyarakat, dan penelitian.</li> </ol>	

NO.	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p><b>B. Rekomendasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Sosial RI harus melakukan koordinasi secara intensif dengan Kementerian Pekerjaan Umum RI agar mempercepat proses renovasi sarana-prasarana di Sentra Tumou Tuo Manado yang akan digunakan untuk SR Manado pada bulan Juli 2025.</li> <li>2. Kementerian Sosial RI harus memastikan bahwa proses perekrutan calon siswa SR yang proses belajar-mengajarnya akan dimulai pada bulan Juli 2025 berjalan sesuai rencana dan persyaratan yang ditetapkan, yaitu berasal dari keluarga miskin.</li> <li>3. Kementerian Sosial RI harus berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah, tanpa terpaku kepada kewenangan masing-masing, dalam melakukan penanganan terhadap penanganan masalah penyandang kesejahteraan sosial. Kementerian Sosial RI dan Pemerintah Daerah harus saling membantu kekurangan masing-masing, sehingga penanganan masalah kesejahteraan sosial menjadi cepat dan tepat.</li> <li>4. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) harus membantu proses rehabilitasi dan rekonstruksi korban yang terdampak bencana letusan Gunung Ruang dan luapan air Danau Ton Danuo di Provinsi Sulawesi Utara.</li> </ol>	

NO.	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI harus mempertimbangkan pengalokasian DAK Non Fisik kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan kebutuhan. Dengan demikian, alokasi DAK Non Fisik untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak sama, tapi berbeda karena kebutuhannya berbeda-beda.</li> <li>6. Baznas dan BWI di tingkat nasional harus memfasilitasi koordinasi Baznas dan BWI Provinsi Sulawesi Utara dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dengan harapan agar Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dapat mengalokasikan bantuan operasional melalui APBD kepada Baznas dan BWI Provinsi Sulawesi Utara.</li> <li>7. Kementerian Agama RI harus memfasilitasi dan mengupayakan peningkatan status kelembagaan IAKN Manado dan IAIN Manado menjadi UAKN dan UIN, sehingga dapat meningkatkan pengelolaan perkuliahan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Provinsi Sulawesi Utara dan sekitarnya.</li> </ol>	
2.	<b>Kunjungan Kerja Reses</b>	Kunjungan Kerja Reses ke Provinsi Sulawesi Utara dilaksanakan pada tanggal 28 Mei – 1 Juni 2025.	<p>Pada Kunjungan Kerja Reses masa persidangan III tahun sidang 2024 – 2025, Tim Kunjungan Kerja Reses ke Provinsi Bali merekomendasikan dan memberikan saran serta masukan sebagai berikut;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SMKN dan SMAN Bali Mandara patut menjadi rujukan</li> </ol>	

NO.	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>pelaksanaan Sekolah Rakyat. Sistem rekrutmen yang ketat, membuat calon peserta didik betul-betul tepat sasaran, yaitu anak-anak yang memang berasal dari keluarga miskin. Selain itu, metode pembelajaran dan pembentukan karakter di SMKN dan SMAN Bali Mandara juga telah terbukti berhasil mendidik anak-anak menjadi anak yang berprestasi dan berdaya saing.</p> <p>2. Pelaksanaan Sekolah Rakyat harus mempertimbangkan aspek keterampilan profesional. Anak-anak yang telah lulus dari Sekolah Rakyat tentu menjadi harapan sebagai pemutus rantai kemiskinan keluarganya. Sehingga, ketika mereka telah lulus, diharapkan mampu dengan cepat mendapatkan akses lapangan pekerjaan. Dari sinilah esensi terpenting Sekolah Rakyat, yaitu tidak hanya mencerdaskan anak bangsa, tetapi juga menciptakan generasi emas yang berkualitas, berdaya saing, serta mampu ditempatkan di ruang-ruang profesional yang menghasilkan pendapatan yang baik untuk mengangkat taraf hidup keluarga mereka.</p> <p>3. Sekolah Rakyat sebagai upaya memutus mata rantai kemiskinan tidak bisa dilakukan oleh satu periode kepemimpinan nasional semata. Program ini harus terus dilaksanakan, dengan berbagai evaluasi dan</p>	

NO.	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>penyempurnaan secara berkelanjutan.</p> <p>4. Penamaan Sekolah Rakyat perlu dipertimbangkan sehingga tidak memunculkan persepsi negatif bahwa sekolah ini adalah sekolah untuk orang-orang miskin. Sekolah Rakyat mungkin perlu dikemas dengan nama yang lebih membanggakan, seperti; Sekolah Tunas Bangsa, atau Sekolah Generasi Emas, dan lain sebagainya. Hal ini juga patut dipertimbangkan agar tidak hanya memunculkan kebanggaan bagi peserta didik itu sendiri, tetapi juga menghindari labeling negatif atau bahkan diskriminasi sosial terhadap anak-anak dari Sekolah Rakyat.</p>	

## LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI IX

### A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

### B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

### C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	<b>Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI</b>	Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI ke Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Papua Barat dilaksanakan pada tanggal 28 Mei-1 Juni 2025, Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 31 Mei-4 Juni 2025	Kunjungan kerja reses Komisi IX DPR RI tidak hanya menyerap aspirasi dan informasi di lapangan tetapi juga membentuk sinergi antara pusat dan daerah khususnya dalam bidang Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Di bidang Kesehatan Komisi IX DPR RI menyoroti beberapa hal seperti jaminan kesehatan, kebijakan kelas rawat inap standar (KRIS), angka stunting, dan juga jumlah dan kualitas SDM kesehatan. Sedangkan pada bidang ketenagakerjaan menyoroti tingkat pengangguran, perlindungan pekerja migran, dan upah minimum provinsi.	

## LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI X

### A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

### B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

### C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah</b></li> <li>2. <b>Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi</b></li> <li>3. <b>Kementerian Kebudayaan</b></li> <li>4. <b>Kementerian Pemuda dan Olahraga</b></li> <li>5. <b>Perpustakaan Nasional RI</b></li> <li>6. <b>Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)</b></li> <li>7. <b>Badan Pusat Statistik (BPS)</b></li> </ol>	<p>Tanggal 28 Mei—1 Juni 2025 Kunker Reses Komisi X DPR RI pada Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024—2025 ke <b>Provinsi Sumatera Utara.</b></p>	<p>Tim Kunker Reses Komisi X DPR RI ke Provinsi Sumatera Utara merekomendasikan sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemendikdasmen berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN untuk mempercepat penyelesaian status lahan satuan pendidikan, terutama sekolah yang masih berdiri di atas lahan K/L seperti PTPN.</li> <li>2. Kemendikdasmen memprioritaskan percepatan rehabilitasi dan pembangunan unit sekolah baru (USB) melalui penyaluran DAK fisik pendidikan atau program revitalisasi dan rehabilitasi lain, khususnya di daerah 3T dan daerah marginal, serta memperluas pemerataan digitalisasi pendidikan dengan menyediakan perangkat TIK dan pelatihan guru secara terintegrasi di seluruh wilayah.</li> <li>3. Kemendikdasmen membangun kolaborasi lintas kementerian yakni dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan Kementerian UKM dalam merumuskan arah pengembangan pendidikan vokasi yang kontekstual dan berbasis kebutuhan riil daerah meliputi;</li> </ol>	

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>potensi ekonomi lokal, tren ketenagakerjaan, serta profil industri strategis di wilayah masing-masing.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Kemendikdasmen menindaklanjuti usulan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk membangun sekolah khusus dan layanan inklusif hingga tingkat kecamatan, serta memperkuat pelatihan dan insentif bagi guru pendidikan khusus.</li> <li>5. Kemendikdasmen bersama BPS, BRIN, Kemendagri dan pemerintah daerah mengembangkan <i>sistem data terpadu</i> yang mengintegrasikan data kependudukan, kemiskinan, partisipasi sekolah, dan ketenagakerjaan agar dukungan kebijakan dan program pendidikan dan bantuan sosial lebih berdampak sejalan dengan prinsip akuntabilitas publik dan kebijakan berbasis bukti (<i>evidence-based policy</i>).</li> <li>6. Kemdiktisaintek melakukan terobosan dengan memfasilitasi percepatan pembukaan program studi pendidikan khusus di perguruan tinggi pada daerah yang membutuhkan, guna memenuhi kebutuhan tenaga pendidik profesional untuk anak berkebutuhan khusus dan mendukung pemerataan layanan pendidikan inklusif di seluruh Indonesia</li> <li>7. Kemenpora, Kementerian PUPR, dan pemerintah provinsi/kabupaten berkolaborasi merumuskan model kerja sama dengan pihak swasta atau lembaga profesional olahraga dalam pengelolaan infrastruktur olahraga pasca PON agar pengelolaannya tidak menjadi beban APBD, melainkan menjadi pusat kegiatan ekonomi, pembinaan prestasi dan edukasi.</li> <li>8. Kementerian Kebudayaan memfasilitasi pemajuan kebudayaan percepatan inventarisasi kekayaan budaya benda dan tak benda, perlindungan regulatif untuk SDM</li> </ol>	

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>budaya, serta pelibatan daerah dalam program Indonesiana dan event berskala nasional.</p> <p>9. Kementerian Kebudayaan dan pemerintah daerah perlu mendorong pembentukan Perda Kebudayaan, pelatihan komunitas budaya, dan pembentukan museum serta galeri lokal dan digitalisasi konten budaya melalui kerja sama dengan Kementerian Komdigi dan Perpustnas.</p> <p>10. BRIN merealisasikan pembentukan BRIDA secara fungsional sebagai lembaga riset daerah untuk memperkuat kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan kebijakan dan program berbasis riset dan inovasi.</p> <p>11. Mendorong Panja RUU tentang Sisdiknas Komisi X DPR RI untuk mempertimbangkan masukan dari pamangku pendidikan di Kabupaten Deli Serdang agar RUU tentang Sisdiknas mengatur penguatan pelaksanaan wajib belajar 13 tahun, penguatan peran orang tua yang bertanggung jawab, dan pengaturan keberadaan pendidikan khusus dalam ekosistem sistem pendidikan nasional dipertegas di dalam RUU tentang Sisdiknas.</p>	
		<p>Tanggal 28 Mei—1 Juni 2025 Kunker Reses Komisi X DPR RI pada Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024—2025 ke <b>Provinsi Sumatera Selatan.</b></p>	<p>Tim Kunker Reses Komisi X DPR RI ke Provinsi Sumatera Selatan merekomendasikan sebagai berikut.</p> <p>1. Mendorong Kemendikdasmen RI berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk membantu SMAN 15 Palembang merenovasi tiga ruang kelas yang tidak layak digunakan. Meskipun tiga ruang kelas tersebut milik UPTD Provinsi Sumatera Selatan, namun telah diijinkan untuk digunakan ruang kelas.</p> <p>2. Mendorong Kemdiktisaintek RI untuk membantu pengembangan perguruan tinggi swasta dan memberikan bantuan dana yang berkeadilan antara PTN dan PTS, serta</p>	

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>memberikan pengembangan karir yang jelas bagi dosen PPPK, dan melakukan evaluasi sistem penerimaan mahasiswa baru, khususnya yang dilakukan oleh PTN.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Mendorong Kemenbud RI berkoordinasi dengan Pemda agar melahirkan regulasi mengenai kebudayaan sebagai implementasi UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.</li> <li>4. Mendorong perguruan tinggi di Sumatera Selatan serta Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah untuk berkolaborasi membantu kegiatan literasi yang dilaksanakan oleh mahasiswa dan komunitas, seperti Organisasi Rumah 5000 Essai.</li> <li>5. Mendorong BPS untuk memperkuat integrasi data statistik BPS dengan data sektoral, untuk menghindari kesenjangan antara data pusat dan daerah, serta kesenjangan data BPS dan sektoral.</li> </ol>	
		<p>Tanggal 28 Mei—1 Juni 2025 Kunker Reses Komisi X DPR RI pada Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024—2025 ke <b>Provinsi Bali.</b></p>	<p>Tim Kunker Reses Komisi X DPR RI ke Provinsi Bali merekomendasikan sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terkait ditemukannya banyak siswa di Bali yang tingkat literasinya masih rendah, Komisi X DPR RI mendorong Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan di Bali untuk memberikan pendidikan khusus, terutama bagi anak-anak dengan hambatan perkembangan kognitif (<i>late mental development</i>) dengan bimbingan guru yang memiliki kemampuan mendidik yang sesuai kebutuhan.</li> <li>2. Komisi X DPR RI mendorong BPS dan BRIN/BRIDA Provinsi Bali agar memberikan dukungan data dan riset kualitatif yang relevan, sehingga menghasilkan gambaran menyeluruh tentang situasi pendidikan di Provinsi Bali, sehingga dapat</li> </ol>	

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>dijadikan dasar bagi perumusan kebijakan yang tepat bagi pengembangan pendidikan di Provinsi Bali.</p> <p>3. Terkait pengelolaan pendidikan tinggi, Komisi X DPR RI mendorong pemerintah dan perguruan tinggi, khususnya di Provinsi Bali untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memastikan program magang (terutama pendidikan tinggi vokasi) sesuai dengan jurusan/program studi yang diambil, dengan meningkatkan kerja sama dengan perusahaan atau industri relevan, memastikan tempat dan tugas magang sesuai dengan kompetensi keilmuan, dan memperkuat peran dosen pembimbing membantu mahasiswa mendapatkan tempat magang yang berkualitas.</li> <li>b. Mengembangkan inovasi anggaran (terutama bagi PTS), agar tidak sekadar bergantung pada anggaran pemerintah (KIP Kuliah, dll), tetapi juga mampu membangun kemandirian institusional melalui kerja sama strategis dengan dunia industri, serta berperan aktif dalam meningkatkan APK pendidikan tinggi.</li> </ul>	

## LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI XI

**A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI**

-

**B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN**

-

**C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN**

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	<b>Kunjungan Kerja Reses Komisi XI Masa Sidang III Tahun Sidang 2024 - 2025</b>	Kunjungan Kerja Reses Komisi XI Masa Sidang III Tahun Sidang 2024 - 2025 ke Kota Denpasar, Provinsi Bali pada tanggal 28 Mei - 1 Juni 2025.	<p>Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan, Komisi XI DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja Reses (Kunker Reses) Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024 - 2025 ke Provinsi Bali pada tanggal 28 Mei – 01 Juni 2025. Kunker reses diikuti oleh beberapa Anggota Komisi XI DPR RI dari berbagai fraksi yang dipimpin oleh Bapak H. Fauzi Amro, M.Si., selaku Wakil Ketua Komisi XI DPR RI. Berlokasi di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kota Denpasar, tim Kunker melakukan pertemuan dengan Ibu Filianingsih Hendarta Deputi Gubernur BI dan perwakilan BI Provinsi Bali, Bapak Ogi Prastomiyono Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun serta OJK Provinsi Bali, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) serta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Bali.</p> <p>Dalam sambutannya, Ketua Tim Kunker Reses Komisi XI DPR RI Bapak H. Fauzi Amro menyampaikan bahwa menurut data sektor pariwisata menyumbang devisa negara sebesar USD 16,71 miliar pada tahun 2024. Angka ini meningkat 19,3% dibandingkan tahun 2023. Devisa pariwisata ini berasal dari kunjungan wisatawan mancanegara, yang pada tahun 2024 ditargetkan sebanyak 14,6 - 16 juta kunjungan. Selain devisa, pariwisata</p>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>juga berkontribusi terhadap PDB nasional. Diperkirakan kontribusi pariwisata terhadap PDB secara nasional pada tahun 2024 mencapai 4,01 - 4,5%. Pariwisata Bali berkontribusi besar terhadap devisa negara dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bali. Pada tahun 2024 Pariwisata Bali menyumbang Rp 107 T (sekitar 44%) atau hampir setengah dari total devisa sektor pariwisata nasional dan kontribusi pariwisata terhadap PDB Bali itu sendiri juga sangat besar, mencapai sekitar 60-70%. Realisasi APBN dan APBD di Bali juga menunjukkan kinerja positif dengan Rasio kemandirian fiskal Provinsi Bali cukup tinggi, yaitu 59,09%.</p> <p>Dibalik angka yang positif tersebut, Fauzi Amro menyoroti mengapa penyaluran Kredit Program di Bali malah mengalami penurunan. Hal ini bisa berdampak bagi sektor usaha khususnya pelaku UMKM sebagai penunjang pariwisata. Melihat kondisi ini, sebagai lembaga negara yang diberi amanat oleh konstitusi, kita berkewajiban untuk selalu hadir dalam memberikan perlindungan dengan terus mendorong kinerja sektor usaha sesuai tupoksi kita masing-masing yang telah diatur oleh undang-undang dengan cara memperluas akses pembiayaan, khususnya bagi UMKM salah satunya melalui penyaluran Kredit Program.</p> <p>Selain itu, pertumbuhan ekonomi dan pariwisata Bali juga perlu diimbangi dengan memberikan perhatian terhadap potensi masalah seperti <i>overtourism</i>, kerusakan, dan kerusakan lingkungan. Salah satu masalah yang perlu diatasi adalah fenomena peningkatan kunjungan wisatawan tapi hotel sepi di Bali yang diduga akibat maraknya akomodasi ilegal. Kondisi ini dapat mengganggu ekosistem perekonomian provinsi Bali yang implikasinya pada penerimaan negara baik dari sektor pajak penginapan/perhotelan dan pemasukan lainnya bagi kas negara ataupun daerah terkhusus pendapatan bagi masyarakat dan pelaku usaha jika tidak ditangani dengan baik. Untuk itu kami mendorong agar bisa memaksimalkan potensi TPID dan TPAKD</p>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>dalam menjaga ekosistem ekonomi untuk mendukung pariwisata yang berkelanjutan. Dari beberapa faktor tersebutlah dan tentunya juga masalah yang lainnya sehingga Komisi XI terdorong untuk melakukan Kunjungan Kerja Reses ini, tutup Bapak Fauzi Amro.</p> <p>Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam pemaparannya berkomitmen untuk selalu saling berkoordinasi bersama TPID dan TPAKD Provinsi Bali dalam menjaga ekosistem ekonomi sebagai upaya mendukung sektor pariwisata yang berkelanjutan khususnya yang ada di Bali. Sementara itu Pemprov Bali melalui TPID dan TPAKD juga berpesan agar sekiranya pemerintah pusat bisa memberikan insentif khusus terhadap Bali dan ada <i>lex specialis</i> dari industri perbankan dan keuangan karena Bali telah menyumbang kontribusi sektor pariwisata terbesar secara nasional. Hal ini dilakukan semata-mata hanya untuk membangun ekosistem ekonomi sebagai upaya dalam menjaga keberlanjutan pariwisata Bali yang tentunya untuk kesejahteraan masyarakat Bali secara umum.</p> <p>Diakhir pertemuan, tim Kunjungan Kerja Reses menekankan betapa pentingnya peran sektor pariwisata dalam ketahanan ekonomi nasional, untuk itu negara perlu hadir dalam menciptakan ekosistem bagi perkembangan pariwisata. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Tim Kunker Reses Komisi XI ingin melihat lebih dalam bagaimana kondisi aktual dari kinerja dan Peran Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) secara konkret dalam menjaga ekosistem ekonomi untuk mendukung pariwisata yang berkelanjutan di provinsi Bali.</p>	
2.	<b>Kunjungan Kerja Reses Komisi XI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024-2025</b>	Kunjungan Kerja Reses Komisi XI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024-2025 ke	Komisi XI DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024-2025 di Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada tanggal 28 Mei hingga 1 Juni 2025. Kunker Reses dipimpin oleh Bapak Dr. Mukhamad Misbakhun, SE, MH,	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 28 Mei - 1 Juni 2025.	<p>Ketua Komisi XI DPR RI, diikuti oleh Bapak Mohamad Hekal, MBA, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dan beberapa anggota Komisi XI DPR RI dari berbagai fraksi.</p> <p>Kunker Reses Komisi XI DPR RI dilaksanakan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap mitra kerja Komisi XI DPR RI di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam kesempatan ini, Tim Kunker Reses Komisi XI DPR RI melakukan pertemuan tentang <b>Pengawasan Bank Daerah</b> dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tentang <b>Roadmap Pelaksanaan UU P2SK</b> dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan tentang <b>Transfer Daerah dan Dana Otsus</b> dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. Hadir dalam kesempatan tersebut Bapak Dian Ediana Rae, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK beserta jajaran, Bapak Didik Madiyono, Anggota Dewan Komisiner LPS beserta jajaran dan Bapak Askolani, Dirjen Perimbangan Keuangan beserta jajaran.</p> <p>Dalam pertemuan tersebut, Bapak Mukhamad Misbakhun menyoroti pertumbuhan kredit, yang hanya sebesar 9%. Angka tersebut menunjukkan penurunan dibandingkan tahun lalu. Penurunan ini harus dapat diatasi, karena untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%, kredit perlu tumbuh 17-18%.</p> <p>Atas pertanyaan tersebut Bapak Dian Ediana Rae menjelaskan bahwa pelaku usaha masih bersikap <i>wait and see</i> terkait gejolak ekonomi global. Dunia perbankan juga belum mau mengubah kebijakan terkait pengucuran kredit, sehingga diperkirakan pertumbuhan kredit sekitar 9-11%. Harapan tertumpu pada program 6 stimulus ekonomi dari pemerintah akan meningkatkan belanja masyarakat, dan pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan kredit.</p>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Bapak Marwan Cik Asan dari Fraksi Partai Demokrat menekankan perlunya kebijakan afirmasi untuk NTT. Hal ini karena buruknya tingkat kemiskinan di NTT, misalnya ditinjau dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tingkat pengangguran dll. Termasuk juga dalam hal perputaran uang. Perhatian khusus perlu diperhatikan kepada NTT, karena apabila itu tidak dilakukan maka 20 tahun lagi NTT tetap akan seperti ini.</p> <p>Bapak Primus Yustisio dari Fraksi Partai Amanat Nasional memberikan perhatian pada kucuran kredit untuk sektor pertanian yang hanya sebesar 5%, padahal 80% warga NTT bekerja di sektor pertanian.</p>	
3.	<b>Kunjungan Kerja Luar Negeri Komisi XI DPR RI</b>	Kunjungan Kerja Luar Negeri Komisi XI DPR RI dalam rangka meningkatkan Peran Diplomasi dan Fungsi Pengawasan di Sektor Keuangan ke Negara Inggris (London) tanggal 17 – 23 Juni 2025	<p>Komisi XI DPR RI merupakan salah satu alat kelengkapan DPR RI yang mempunyai ruang lingkup tugas di bidang Keuangan dan Perbankan yang bermitra kerja dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Sekretariat Jenderal BPK RI, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Perbankan serta Lembaga Keuangan Bukan Bank.</p> <p>Sejalan dengan ruang lingkup tugas tersebut, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara atau APBN dan Perbankan, Komisi XI DPR RI melakukan pengawasan terhadap mitra-mitra di Pemerintah baik dalam bentuk Pengawasan melalui Panitia Kerja (Panja) maupun melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah melalui mekanisme rapat di DPR RI maupun kunjungan yang dilakukan langsung ke lokasi mitra kerja di seluruh Indonesia.</p> <p>Sesuai dengan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPR RI</p>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>mempunyai tiga fungsi yang terdiri dari fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan kebijakan Pemerintah. Ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam kerangka representasi rakyat, dan juga untuk mendukung upaya Pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan fungsi DPR terhadap kerangka representasi rakyat dilakukan melalui pembukaan ruang partisipasi publik, transparansi pelaksanaan fungsi, dan pertanggungjawaban kerja DPR kepada rakyat.</p> <p>Fungsi legislasi dilaksanakan sebagai perwujudan DPR RI selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang dan fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Sedangkan fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN. Fungsi pengawasan memiliki makna utama melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang yang dilakukan oleh Pemerintah. Selain itu, DPR juga melakukan pengawasan atas berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah yang memiliki dampak terhadap kehidupan rakyat secara keseluruhan.</p> <p>Dalam melaksanakan fungsi pengawasan tersebut khususnya yang terkait dengan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN, hal yang sangat dibutuhkan oleh DPR RI adalah ketersediaan data dan informasi di mana hal tersebut tergantung dari akses informasi yang diberikan oleh mitra-mitranya. Dalam Rapat Internal Komisi XI DPR RI memutuskan untuk melakukan kunjungan kerja ke negara Inggris.</p> <p>Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR RI terhadap Pemerintah, Komisi XI DPR RI bermaksud melakukan Kunjungan Kerja ke luar negeri dalam rangka melaksanakan</p>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>tugas pengawasan dan mengetahui secara langsung kebijakan serta mendapatkan informasi terkait mekanisme, fungsi tugas beberapa institusi di bidang moneter, fiskal dan industri di kota London– Inggris, yaitu Kedutaan Besar Republik Indonesia, Kantor Perwakilan Luar Negeri Bank Indonesia, Bursa Saham London (<i>London Stock Exchange atau LSE</i>) dan <i>All-Party Parliamentary Group (APPG) on Indonesia</i>.</p> <p>Kunjungan ini juga dapat menjadi masukan dan perbandingan bagi Anggota Komisi XI DPR RI dalam melakukan fungsi pengawasan bagi mitra kerja Komisi XI DPR RI di Indonesia, serta melihat dari dekat perbandingan praktik penerapannya di negara lain.</p>	
4.	<b>Kunjungan Kerja Luar Negeri Komisi XI DPR RI</b>	Kunjungan Kerja Luar Negeri Komisi XI DPR RI dalam rangka meningkatkan Peran Diplomasi dan Fungsi Pengawasan di Sektor Keuangan ke Negara Amerika Serikat (Chicago) ) tanggal 17 – 23 Juni 2025.	<p>Komisi XI DPR RI merupakan salah satu alat kelengkapan DPR RI yang mempunyai ruang lingkup tugas di bidang Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, Moneter dan Sektor Jasa Keuangan.</p> <p>Sejalan dengan ruang lingkup tugas tersebut, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara atau APBN dan Perbankan, Komisi XI DPR RI melakukan pengawasan terhadap mitra-mitra di Pemerintah baik dalam bentuk Pengawasan melalui Panitia Kerja (Panja) maupun melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah melalui mekanisme rapat di DPR RI maupun kunjungan yang dilakukan langsung ke lokasi mitra kerja di seluruh Indonesia.</p> <p>Sesuai dengan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPR RI mempunyai tiga fungsi yang terdiri dari fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam kerangka representasi rakyat, dan juga untuk mendukung upaya Pemerintah dalam</p>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan fungsi DPR terhadap kerangka representasi rakyat dilakukan melalui pembukaan ruang partisipasi publik, transparansi pelaksanaan fungsi, dan pertanggungjawaban kerja DPR kepada rakyat.</p> <p>Fungsi legislasi dilaksanakan sebagai perwujudan DPR RI selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang dan fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Sedangkan fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN.</p> <p>Fungsi pengawasan memiliki makna utama melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang yang dilakukan oleh Pemerintah. Selain itu, DPR juga melakukan pengawasan atas berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah yang memiliki dampak terhadap kehidupan rakyat secara keseluruhan.</p> <p>Dalam melaksanakan fungsi pengawasan tersebut khususnya yang terkait dengan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN, hal yang sangat dibutuhkan oleh DPR RI adalah ketersediaan data dan informasi di mana hal tersebut tergantung dari akses informasi yang diberikan oleh mitra-mitranya.</p> <p>Pelaksanaan fungsi pengawasan dilakukan oleh DPR RI melalui berbagai rapat-rapat seperti rapat kerja, rapat dengan pendapat, rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja spesifik dan kunjungan kerja reses, pembentukan tim dan panitia kerja, pemberian pertimbangan dan persetujuan atas usulan pengangkatan pejabat publik. Selain itu, penggunaan hak DPR seperti hak</p>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>interpelasi (meminta keterangan), hak angket (penyelidikan) dan hak menyatakan pendapat. Secara normatif pelaksanaan fungsi pengawasan DPR sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 42 Tahun 2014 tentang MD3.</p> <p>Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR RI terhadap Pemerintah, Komisi XI DPR RI bermaksud melakukan Kunjungan Kerja ke luar negeri dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan dan mengetahui secara langsung kebijakan serta mendapatkan informasi terkait mekanisme, fungsi tugas beberapa institusi di bidang perdagangan emas dan derivatif di kota Chicago – Amerika Serikat yaitu Konsul Jenderal Republik Indonesia, <i>Chicago Mercantile Exchange (CME) Group</i> dan <i>Straits Financial</i>.</p> <p>Kunjungan ini juga dapat menjadi masukan dan perbandingan bagi Anggota Komisi XI DPR RI dalam melakukan fungsi pengawasan bagi mitra kerja Komisi XI DPR RI di Indonesia, serta melihat dari dekat perbandingan praktik penerapannya di negara lain.</p> <p><i>Output</i> yang diharapkan dari Kunjungan Kerja ke Luar Negeri ini adalah akan ada proses pembelajaran bagi Anggota Komisi XI DPR RI dalam melakukan pengawasan terhadap mitra kerja Komisi XI DPR RI. Hasil kunjungan ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi seluruh anggota delegasi dalam melakukan tiga fungsi yang dimiliki oleh DPR RI khususnya fungsi pengawasan.</p>	

## LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI XII

### A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

### B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

### C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	<b>Kunjungan Kerja Reses Komisi XII DPR RI</b>	Kunjungan Kerja Reses Komisi XII ke: 1. Provinsi Sumatera Utara; 2. Provinsi Jambi; 3. Provinsi Kalimantan Timur.  Dilaksanakan pada tanggal 19 – 23 Juni 2025	Konsultasi Terkait dampak operasi pertambangan terhadap lingkungan hidup.	

## LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI XIII

**A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI**

-

**B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN**

-

**C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN**

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	<b>Kunjungan Kerja Reses Komisi XIII DPR RI</b>	Kunjungan Kerja Reses Komisi XII dilaksanakan pada tanggal 19 – 23 Juni 2025 ke: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Provinsi Sumatera Selatan;</li> <li>2. Provinsi Kalimantan Selatan;</li> <li>3. Provinsi Papua Barat Daya.</li> </ol>	<p><b>1. Provinsi Sumatera Selatan</b></p> <p>Dalam Rapat Dengar Pendapat Dengan Kanwil Kementerian Hukum, Kanwil Kementerian HAM, Kanwil Ditjen Imigrasi Dan Kanwil Ditjen Pemasarakatan Provinsi Sumatera Selatan ini tidak ada pengambilan Kesimpulan, hanya berupa catatan semata, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Komisi XIII DPR RI Meminta Kanwil Ditjen Imigrasi Sumatera Selatan, Kanwil Ditjen Pemasarakatan Sumatera Selatan, Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Selatan, dan Kanwil Kementerian HAM Sumatera Selatan untuk mengoptimalkan peningkatan kinerja dengan berbasis kepada capaian realisasi program dan berorientasi target.</li> <li>- Komisi XIII DPR RI Mengapresiasi Kanwil Ditjen Imigrasi Provinsi Sumatera Selatan meningkatkan kapasitas</li> </ul>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>petugas dan melakukan penguatan sistem pemeriksaan keimigrasian dengan memodernisasi infrastruktur, melakukan tranformasi layanan yang humanis dan melakukan terobosan/inovasi melalui teknologi sistem informasi digital di seluruh TPI dan UKK di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, dan Komisi XIII DPR RI meminta Kanwil Ditjen Imigrasi untuk melakukan peningkatan PNBPN, dan Komisi XIII DPR RI Mendorong penambahan dan peningkatan kelas kanwil imigrasi menjadi tipe A, serta kenaikan kelas kanimsus Palembang dan Kanim Kelas 1 Muara Enim di Sumatera Selatan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Komisi XIII DPR RI Mendorong Kanwil Ditjen Imigrasi Provinsi Sumatera Selatan, Melakukan pemetaan wilayah rawan imigrasi ilegal dan meningkatkan frekuensi pengawasan di daerah rawan dengan memberdayakan Tim Patroli Orang Asing (TIMPORA) dan mengefektifkan kinerja Petugas Imigrasi Pembina Desa (PIMPASA).</li> <li>- Komisi XIII DPR RI Meminta Kanwil Ditjen Pemasarakatan Provinsi Sumatera Selatan untuk terus berinovasi dalam upaya mengatasi laju over kapasitas hunian di lapas-lapas dan rutan dengan melahirkan terobosan yang lebih konfrehensif dan Melengkapi sarana sistem keamanan serta peralatan keamanan bagi petugas lapas untuk pencegahan terhadap tindakan</li> </ul>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>provokatif dan aksi bersama anarkis dari warga binaan yang berupaya melakukan kerusuhan dan upaya melarikan diri. dan Komisi XIII DPR RI mendorong untuk memperjelas <i>MOU</i> terkait penyediaan lahan untuk pembangunan Lapas Baru.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Komisi XIII DPR RI mencermati masih adanya tindakan-tindakan yang melanggar aturan terjadi di lapas-lapas seperti penyelundupan narkoba, penggunaan telepon genggam dan tindakan pungutan liar. Untuk itu Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Provinsi Sumatera Selatan wajib memperketat pengawasan dan melakukan pencegahan dengan memberikan sanksi yang tegas bagi petugas lapas yang melakukan pelanggaran, dan Komisi XIII mendorong asupan gizi WBP terpenuhi, baik balita maupun untuk lansia.</li> <li>- Komisi XIII DPR RI Meminta Kanwil Kementerian Hukum Provinsi Sumatera Selatan, Memastikan keselarasan Produk Hukum Daerah (PERDA Provinsi dan Kabupaten/Kota) dengan Peraturan Perundang-Undangan Nasional, Melalui asistensi dan pengawalan proses penyusunannya dengan melibatkan secara aktif SDM Perancang Undang-Undang yang kompeten.</li> <li>- Komisi XIII DPR RI Mendukung Kanwil Kementerian Hukum Provinsi Sumatera Selatan untuk melakukan upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat,</li> </ul>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>aksesibilitas dan tranparansi pelayanan hukum, pemanfaatan teknologi informasi (digitalisasi), efektivitas pos bantuan hukum (POSBANKUM) dan Kemudahan pengajuan pencatatan hak kekayaan intelektual.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Komisi XIII DPR RI Meminta Kanwil Kementerian HAM Provinsi Sumatera Selatan untuk memprioritaskan Penguatan HAM dengan melaksanakan program Kabupaten/Kota peduli HAM, Pemajuan nilai-nilai toleransi, Perlindungan HAM bagi Kelompok rentan, dan Implementasikan strategi nasional bisnis dan HAM bagi pelaku usaha di Provinsi Sumatera Selatan dan mendukung penguatan anggaran Kementerian HAM.</li> <li>- Komisi XIII DPR RI meminta jawaban tertulis dari Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pemasarakatan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum, Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM dan Komnas HAM di Provinsi Sumatera Selatan terkait dengan apa yang sudah disampaikan anggota Komisi XIII DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat Kunjungan Reses paling lambat 7 hari kerja.</li> </ul> <p><b>2. Kalimantan Selatan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komisi XIII DPR RI mengapresiasi upaya Kanwil Ditjen Pemasarakatan Kalimantan Selatan dalam redistribusi warga binaan, pembangunan blok hunian baru, serta</li> </ol>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>pengadaan dan penyelesaian status lahan. Komisi XIII juga mendorong penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah guna mengatasi permasalahan <i>over</i> kapasitas secara lebih strategis, terencana, dan kolaboratif.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Komisi XIII DPR RI menekankan pentingnya penguatan program pembinaan kemandirian dan rehabilitasi yang inklusif dari Kanwil Ditjen Pemasaryakatan, khususnya bagi kelompok rentan seperti perempuan, anak, lansia, dan ODGJ, dalam mendukung reintegrasi sosial warga binaan.</li> <li>3. Komisi XIII DPR RI mencermati lemahnya pengawasan internal di UPT Pemasaryakatan dan mendorong Kanwil Ditjen Pemasaryakatan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kepatuhan internal, sistem pelaporan publik, dan penegakan sanksi yang tegas.</li> <li>4. Komisi XIII DPR RI mengapresiasi inisiatif Kanwil Ditjen Imigrasi Kalimantan Selatan dalam memperkuat layanan, seperti program Desa Binaan Imigrasi untuk mencegah PMI non-prosedural dan TPPO, serta peningkatan sinergi pengawasan orang asing melalui Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) di berbagai level</li> <li>5. Komisi XIII DPR RI mendorong Kanwil Ditjen Imigrasi Kalimantan Selatan memperluas layanan ke wilayah strategis, memperkuat pengawasan jalur masuk tidak resmi, dan bekerja sama dengan pemda dalam penyediaan lahan serta infrastruktur imigrasi.</li> <li>6. Komisi XIII DPR RI mengapresiasi Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Selatan atas komitmennya memperluas akses layanan hukum melalui sosialisasi ke daerah, penyuluhan hingga tingkat desa, serta</li> </ol>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>pendampingan bagi pelaku usaha dan masyarakat dalam legalisasi dokumen dan pendirian badan hukum, guna mewujudkan layanan hukum yang cepat, transparan, dan inklusif.</p> <p>7. Komisi XIII DPR RI mendorong Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Selatan memperkuat kebijakan, kelembagaan, dan regulasi, termasuk pengembangan pembentukan pos bantuan hukum di desa, digitalisasi layanan hukum, serta pembentukan jabatan fungsional tertentu untuk mendukung tata kelola yang akuntabel dan efisien.</p> <p>8. Komisi XIII DPR RI mengapresiasi Komnas HAM dan Kanwil Kementerian HAM atas komitmen dalam pemajuan dan penegakan HAM di Kalimantan Selatan, khususnya dalam penanganan kasus kekerasan terhadap jurnalis melalui pemantauan aktif dan pendampingan korban.</p> <p>9. Komisi XIII DPR RI mendukung penguatan anggaran bagi Kanwil Kementerian HAM Kalimantan Selatan sebagai langkah strategis untuk memperluas cakupan layanan HAM yang berkualitas di daerah.</p> <p>10. Komisi XIII DPR RI mendukung pembentukan kantor perwakilan Komnas HAM di Kalimantan Selatan sebagai langkah strategis untuk memperkuat perlindungan HAM di daerah dan layanan HAM dapat berjalan optimal serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat.</p> <p><b>3. Papua Barat Daya</b> Tim Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Komisi XIII DPR RI telah mendengarkan paparan dari Gubernur Provinsi Papua</p>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Barat Daya, Kepala Kantor Wilayah Imigrasi, Kepala Kantor Wilayah Pemasyarakatan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum, Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM, Komnas HAM RI dan FORKOPIMDA di Provinsi Papua Barat Daya, terkait dengan tugas dan kondisi di wilayah Provinsi Papua Barat Daya. Dalam hal ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komisi XIII DPR RI akan menindaklanjuti kepada Kementerian Sekretariat Negara untuk memberikan dukungan anggaran bagi pembangunan gedung kantor Gubernur Papua Barat Daya, DPRD Provinsi Papua Barat Daya, Majelis Rakyat Papua, dan OPD sebagai sarana pendukung utama pelaksanaan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik.</li> <li>2. Komisi XIII DPR RI mendukung dan memfasilitasi keinginan Gubernur Provinsi Papua Barat Daya untuk bertemu dengan Presiden Republik Indonesia dan akan menindaklanjuti melalui Menteri Sekretaris Negara agar Presiden Republik Indonesia juga berkunjung ke Papua.</li> <li>3. Komisi XIII DPR RI mendukung Kantor Wilayah Direktorat Jendral Imigrasi Provinsi Papua Barat (meliputi Papua Barat Daya) melakukan peningkatan status Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sorong menjadi Kantor Imigrasi Kelas I, dalam rangka memperkuat kapasitas kelembagaan dan pelayanan keimigrasian.</li> <li>4. Komisi XIII DPR RI mendorong Direktorat Jenderal Imigrasi dan Pemasyarakatan agar melakukan peningkatan alokasi serta penguatan kompetensi sumber</li> </ol>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>daya manusia pada kantor-kantor wilayah imigrasi dan pemasyarakatan di Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Komisi XIII DPR RI mendukung Kementerian HAM untuk membentuk kantor wilayah di wilayah kerja Provinsi Papua Barat, dengan mempertimbangkan hasil pemetaan kebutuhan secara spesifik di masing-masing daerah, termasuk jumlah penduduk, tingkat kerentanan masyarakat, dan aksesibilitas wilayah, guna menentukan prioritas pembentukan kantor secara lebih tepat dan efektif di kawasan Papua.</li> <li>6. Komisi XIII DPR RI mendukung Komnas HAM untuk memperkuat upaya penegakan hak asasi manusia di Provinsi Papua Barat Daya, serta mendesak pemerintah untuk melakukan pendekatan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan (<i>prosperity</i>) dibandingkan keamanan (<i>security</i>) bagi masyarakat, sehingga peristiwa konflik di Kabupaten Maybrat dapat dijadikan momentum evaluatif guna memperkuat komitmen penegakan HAM secara menyeluruh, dan berkeadilan di wilayah Papua serta pembinaan kelompok kekerasan agar berbaur kembali ke masyarakat.</li> <li>7. Komisi XIII DPR RI mendukung pernyataan Majelis Rakyat Papua agar Pemerintah Pusat mengevaluasi kembali perizinan investasi yang dilakukan di wilayah otonomi baru Provinsi Papua Barat Daya.</li> </ol>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			8. Komisi XIII DPR RI meminta Jawaban tertulis dari kepala kantor Wilayah Imigrasi, Kepala Kantor Wilayah Pemasyarakatan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum, Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM, dan Ketua Komnas HAM di Provinsi Papua Barat terkait dengan apa yang sudah disampaikan anggota komisi XIII DPR RI dalam rapat dengar pendapat Kunjungan Kerja Reses paling lambat 7 hari kerja.	

## LAPORAN DWI MINGGUAN BADAN LEGISLASI

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	<b>RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila</b>	Audiensi dilaksanakan pada Selasa, 10 Juni 2025 pukul 10.00 WIB.	Badan Legislasi menerima Audiensi dengan Kepala BPIP beserta jajaran. Kesimpulan: <u>Tertutup</u>	
2.	-	Rapat Koordinasi dilaksanakan pada Rabu, 4 Juni 2025 pukul 10.00 WIB.	Sekretariat Badan Legislasi melaksanakan Rapat Koordinasi dengan PIC AKD (Operator SILEG) dalam rangka Optimalisasi Kompetensi SILEG dalam mendukung Kinerja Legislasi yang cepat dan akurat. Kesimpulan: - PIC baru akan diberikan akses ke SILEG - Akan dilaksanakan Bimbingan Teknis selanjutnya terkait penggunaan SILEG	
3.	-	Audiensi dilaksanakan pada Senin, 16 Juni 2025 pukul 10.00 WIB.	Badan Legislasi menerima Audiensi dengan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam rangka pembahasan dan pendalaman materi Raperda Provinsi NTB tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Provinsi NTB. Kesimpulan: <u>Tertutup</u>	
4.	-	Rapat Koordinasi dilaksanakan pada Kamis, 19 Juni 2025 pukul 10.00 WIB.	Sekretariat Badan Legislasi melaksanakan Rapat Koordinasi dengan Tenaga Ahli Badan Legislasi dalam rangka Penyusunan Jadwal MS IV Tahun Sidang 2024-2025 dan lain-lain. Kesimpulan: <u>Rapat Tertutup</u>	

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
5.	<b>RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah</b>	Rapat Koordinasi dilaksanakan pada Senin, 23 Juni 2025 pukul 14.00 WIB.	Tenaga Ahli Badan Legislasi melaksanakan Rapat Koordinasi dengan Tenaga Ahli Komisi VIII dalam rangka Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.  Kesimpulan: <i><u>Rapat Tertutup</u></i>	

## LAPORAN DWI MINGGUAN BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	<b>KSB - BKSAP</b>	<i>Friendly Talk</i> Wakil Ketua BKSAP dan GKSB Prancis dengan Anggota Majelis Nasional Prancis dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2025.	<p>Wakil Ketua BKSAP DPR RI Muhammad Husein Fadlulloh (F-PGerindra) dan Anggota GKSB Prancis menerima kunjungan Anggota Majelis Nasional Prancis Hon. Mrs. Anne Genetet di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, hari ini (28/5/2025). Pertemuan ini menegaskan pentingnya memperkuat hubungan bilateral Indonesia–Prancis melalui diplomasi parlementer yang strategis dan inklusif.</p> <p>Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak menaruh perhatian khusus pada kerja sama di bidang pendidikan. BKSAP mendorong peningkatan akses beasiswa, pertukaran pelajar, serta kemitraan antaruniversitas dan lembaga riset. Parlemen diyakini memiliki peran penting dalam membuka jalur kebijakan yang mendukung mobilitas pemuda dan kolaborasi akademik lintas negara.</p> <p>Selain itu, dibahas pula peluang untuk pertukaran anggota parlemen sebagai bagian dari penguatan <i>people-to-people contact</i>. Melalui forum dialog dan kunjungan timbal balik, kedua parlemen dapat saling berbagi praktik terbaik dalam demokrasi, toleransi, dan pembangunan berkelanjutan. Semoga langkah ini menjadi pijakan menuju kemitraan yang lebih erat antara Indonesia dan Prancis</p>	
2.	<b>KSB - BKSAP</b>	<i>Friendly Talk</i> Wakil Ketua BKSAP dan GKSB India dengan Delegasi Parlemen	Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Muhammad Husein Fadlulloh (F-Gerindra) dan Ketua Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI - Parlemen India, Muhammad Rofiqi (F-Gerindra)	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		India dilaksanakan tanggal 28 Mei 2025.	<p>menerima kunjungan Delegasi Parlemen India yang dipimpin oleh Hon. Mr. Sanjay Kumar Jha, Jakarta, Rabu (28/05/2025)</p> <p>Kunjungan ini mencerminkan komitmen bersama antara Indonesia dan India, dalam upaya mendukung perdamaian global, mempererat kerja sama yang berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip-prinsip demokrasi. Di samping itu, pertemuan ini turut mengulas berbagai isu strategis serta peluang kerja sama yang berpotensi mempererat hubungan bilateral antara kedua negara.</p>	
3.	<b>KSB - BKSAP</b>	Rapat Internal GKSB DPR RI – Parlemen Nigeria dilaksanakan tanggal 4 Juni 2025.	<p>GKSB DPR RI - Parlemen Nigeria yang dipimpin oleh Faujia Helga Br. Tampubolon (F-PD) mengadakan rapat internal guna membahas rencana program kerja GKSB DPR RI - Parlemen Nigeria dalam periode 2024-2029. GKSB Nigeria menilai bahwa selain dalam penguatan kerja sama antar-parlemen, kedua negara juga perlu meningkatkan kerja sama pada bidang perdagangan, pertambangan serta pendidikan dan kepemudaan.</p> <p>Selain itu dibahas pula rencana kunjungan GKSB DPR RI - Parlemen Nigeria dalam waktu yang akan datang. Kedepannya GKSB Nigeria juga akan mengadakan pertemuan dengan Direktorat Afrika Kemlu RI untuk stocktaking isu - isu dan potensi kerja sama terkini antara RI dan Nigeria. Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Anggota GKSB DPR RI - Parlemen Nigeria, Dr. Hj. Anna Muawanah (F-PKB) dan dr. Gamal Albinsaid (F-PKS).</p>	
4.	<b>KSOI - BKSAP</b>	11th BRICS+ Parliamentary Forum, Brasilia, Brazil dilaksanakan tanggal 3 – 5 Juni 2025.	<p>Indonesia mendorong BRICS untuk memperkuat komitmennya terhadap keamanan kesehatan global, melalui pengembangan kapasitas, pembagian sumber daya medis, dan menciptakan akses yang setara terhadap vaksin, khususnya di negara-negara berkembang.</p> <p>Hal tersebut disampaikan Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera dalam pidatonya pada <i>1st Working</i></p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p><i>Session</i> dengan tema BRICS <i>Interparliamentary Alliance for Global Health</i>, di Brasilia, Brazil (4/6/2025). Sesi ini merupakan rangkaian Sidang ke-11 Forum Parlemen Negara-Negara Anggota BRICS.</p> <p>Wakil Ketua BKSAP DPR RI M. Husein Fadlulloh menyampaikan intervensi pada 2nd Working Session Sidang ke-11 Parlemen Negara-Negara BRICS dengan tema <i>Promoting Investment and Technology Transfer for Sustainable Development</i>, di Brasilia, Brazil 3 Juni 2025.</p> <p>Dalam forum tersebut, Politisi Partai Gerindra ini menyampaikan bahwa BRICS dapat memberikan peluang pendanaan alternatif untuk mendukung infrastruktur penting dan proyek pembangunan berkelanjutan di negara-negara anggota, termasuk transisi energi.</p> <p>BRICS juga memberikan peluang kolaboratif dalam industri pertanian, dengan tujuan meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Hal ini penting bagi Indonesia yang sedang memprioritaskan pencapaian swasembada pangan nasional sekaligus berkontribusi pada inisiatif penanggulangan kelaparan global.</p> <p>Pada sela-sela rangkaian sidang, Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera didampingi Wakil Ketua BKSAP M. Husein Fadlulloh juga mengadakan pertemuan bilateral dengan Ketua Komisi Politik Luar Negeri Senat Rusia, Grigory Karasin.</p> <p>Selain membahas peningkatan hubungan kerja sama Indonesia-Rusia di berbagai bidang, pertemuan ini juga membahas program kerja dan masa depan organisasi BRICS di masa yang akan datang.</p>	
5.	<b>KSB - BKSAP</b>	<i>Courtesy Call</i> Wakil Ketua BKSAP dan GKSB Italia dengan Duta Besar Italia untuk	Wakil Ketua BKSAP DPR RI (F-PD) Bramantyo Suwondo bersama Anggota GKSB DPR RI - Parlemen Italia, Once Mekel (F-PDIP) menerima Duta Besar	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		Indonesia dilaksanakan tanggal 5 Juni 2025.	<p>Italia untuk Indonesia, H.E. Mr. Roberto Colamine pada hari Kamis (05/06/25).</p> <p>Pada pertemuan tersebut dibahas upaya penguatan kerja sama RI - Italia khususnya pada bidang kerja sama antar-parlemen, ekonomi perdagangan, pendidikan serta kebudayaan, khususnya pada kebudayaan tradisional dan kerja sama antara musisi Indonesia - Italia. Dibahas pula upaya akselerasi negosiasi perundingan dagang I-EU CEPA.</p> <p>Duta Besar Italia untuk Indonesia menyambut baik upaya penguatan kerja sama DPR RI - Parlemen Italia serta menyampaikan bahwa pihaknya siap mendukung untuk menjembatani kepentingan kedua parlemen. Kedepannya GKSB DPR RI - Parlemen Italia akan mengadakan pertemuan virtual dengan <i>counterpartsnya</i>/ pihak - pihak Parlemen Italia serta berpartisipasi dalam kegiatan - kegiatan yang akan diadakan oleh pihak Kedutaan Besar Italia sebagai bentuk komitmen penguatan kerja sama antara kedua negara.</p>	
6	<b>KSR - BKSAP</b>	<i>8th Meeting of AIPA Advisory Council on Dangerous Drugs (AIPACODD)</i> dilaksanakan tanggal 9 - 12 Juni 2025.	<p>Delegasi DPR RI, yang terdiri dari Bapak Ravindra Airlangga, Ibu Himmatul Aliya, Ibu Ade Rossi Khoerunissa, dan Bapak Elpisina, telah menghadiri Pertemuan ke-delapan ASEAN <i>Inter-Parliamentary Assembly Advisory Council on Dangerous Drugs (AIPACODD)</i> yang diselenggarakan pada 9-12 Juni 2025 di Kuantan, Malaysia.</p> <p>Pada hari pertama, Ibu Himmatul Aliya, pada diskusi panel dengan narasumber dari <i>United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)</i>, <i>ASEAN Senior Officials on Drug Matters (ASOD)</i>, <i>National Anti-Drug Agency (NADA)</i> dan <i>Ministry of Health, Malaysia</i>, menyampaikan tantangan wilayah Indonesia yang luas, sehingga pelayanan Intervensi Berbasis Masyarakat menjadi penting untuk memastikan seluruh provinsi terjangkau fasilitas tersebut. Indonesia membuka diskusi dengan narasumber mengenai cara-</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>cara memastikan Intervensi Berbasis Masyarakat tetap berjalan sesuai standar pelayanan kesehatan nasional.</p> <p>Pada sesi ke-dua, Ketua Delegasi, Bapak Ravindra Airlangga, menyampaikan <i>Country Progress Report</i> Indonesia dalam penanggulangan masalah obat-obatan terlarang sejak pertemuan AIPACODD pada tahun 2024 lalu. Dalam laporannya, Bapak Ravindra menggarisbawahi posisi geografis Indonesia yang meningkatkan kompleksitas ancaman narkotika yang harus dihadapi. Selain merespons dengan pendekatan seimbang antara penegakan hukum dan layanan kesehatan publik, Indonesia mendorong kerja sama lintas negara serta reformasi hukum untuk menghadapi kejahatan narkotika <i>modern</i> yang semakin canggih.</p> <p>Menutup pertemuan hari pertama, Ibu Adde Rossi Khoerunissa bicara dalam diskusi rencana pembentukan <i>Study Committee</i> untuk mendiskusikan kemungkinan perluasan mandat AIPACODD ke isu kejahatan transnasionalisme. Ibu Adde Rossi Khoerunissa menyampaikan bahwa penguatan mandat akan menjawab semakin kompleksnya modus kejahatan narkotika dan obat-obatan terlarang yang berkelindan dengan isu kejahatan transnasionalisme, termasuk perdagangan manusia, perdagangan gelap senjata, dan pencucian uang.</p> <p>Pada pertemuan hari kedua, Delegasi Indonesia mengusulkan untuk menambahkan salah satu pasal pada resolusi mengenai <i>Uniting Parliament for an Inclusive and Sustainable ASEAN in Addressing Contemporary Drug Challenges</i>. Pasal tambahan yang disepakati adalah mengenai pentingnya kebijakan pencegahan yang komprehensif melalui edukasi keluarga, sekolah, dan komunitas telah disetujui secara aklamasi oleh seluruh anggota AIPA. Tambahan pasal ini akan menjadi dasar parlemen untuk mendorong penguatan ketahanan generasi muda terhadap narkoba.</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
7	<b>KSB - BKSAP</b>	<i>Courtesy Call</i> Pimpinan BKSAP dengan Duta Besar Serbia untuk Indonesia dilaksanakan pada 10 Juni 2025.	<p>Pimpinan BKSAP DPR RI menerima <i>Courtesy Call</i> Duta Besar Serbia untuk Indonesia, H.E. Mrs. Ivana Golubovic Duboka pada hari Selasa (10/06/25).</p> <p>Dalam pertemuan tersebut dibahas berbagai upaya penguatan hubungan bilateral antara Indonesia dan Serbia dalam bidang kerja sama polugri, antar-parlemen serta hubungan antar-masyarakat.</p> <p>Kedua pihak sepakat akan pentingnya meningkatkan hubungan antar-parlemen yang diharapkan dapat disalurkan melalui terbentuknya Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI - Parlemen Serbia. Kedepannya BKSAP DPR RI dan Kedutaan Besar Serbia akan terus berkomunikasi guna menjembatani kepentingan kedua negara.</p>	
8.	<b>KSB - BKSAP</b>	Pertemuan Ketua BKSAP DPR RI dengan <i>Congressional Office for International Leadership</i> (COIL) Kongres Amerika Serikat dilaksanakan tanggal 10 Juni 2025.	<p>Ketua BKSAP DPR RI, Dr. Mardani Ali Sera mengadakan pertemuan dengan <i>Congressional Office for International Leadership</i> (COIL) Kongres Amerika Serikat pada hari Selasa (10/06/2025).</p> <p>Ketua BKSAP DPR RI menyambut baik upaya penguatan kerja sama antara Kongres AS dan DPR RI melalui COIL. Program Kerja sama yang ditawarkan oleh COIL antara lain berupa pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi anggota DPR RI.</p> <p>Ketua BKSAP DPR RI juga menambahkan pentingnya pengembangan kapasitas bagi Anggota DPR RI khususnya dalam <i>public outreach</i> dan komunikasi dengan <i>grassroot community</i> di konstituen masing - masing anggota. Hal ini tentunya sejalan dengan penguatan kerja sama antar RI - AS pada bidang penguatan dan kerja sama demokrasi kedua negara.</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
9.	KSB - BKSAP	Kunjungan Diplomasi BKSAP ke RRT dilaksanakan tanggal 11 – 17 Juni 2025.	<p>Delegasi BKSAP DPR RI yang dipimpin oleh Ketua BKSAP DPR RI, Dr. Mardani Ali Sera (F-PKS) mengadakan kunjungan diplomasi BKSAP ke RRT pada tanggal 11-17 Juni 2025. Delegasi beranggotakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Irine Yusiana Roba Putri (F-PDIP)</li> <li>2. Ravindra Airlangga (F-PG)</li> <li>3. Muhammad Husein Fadlulloh (F-PGerindra)</li> <li>4. Bramantyo Suwondo (F-PD)</li> </ol> <p>Dalam kunjungan tersebut, delegasi mengadakan pertemuan / mengunjungi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Shanghai Municipal People's Congress (SMPC)</i></li> </ol> <p>Kegiatan ini diawali dengan kunjungan resmi ke Shanghai Municipal People's Congress (SMPC) pada 12 Juni 2025, yang disambut langsung oleh Wakil Ketua Komite Tetap SMPC, Mr. Zang Quan, Shanghai, (12/06/2025)</p> <p>Turut hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua BKSAP, Ravindra Airlangga (Fraksi Golkar) dan Bramantyo Suwondo (Fraksi Demokrat), serta Konsul Jenderal Republik Indonesia di Shanghai, Bapak Berlianto Situngkir.</p> <p>Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak saling menyampaikan apresiasi dan berdiskusi mengenai berbagai isu strategis yang memiliki potensi untuk dijadikan sebagai fokus kerja sama antara Indonesia dan Tiongkok di masa mendatang. Mr. Zang menekankan bahwa Shanghai merupakan salah satu gerbang utama perekonomian nasional dan global Tiongkok.</p> <p>Fokus pembangunan kota ini mencakup penguatan hubungan internasional, sektor ekonomi dan perdagangan, pengembangan pusat</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>pasar keuangan, pusat perbelanjaan, serta pusat inovasi di bidang sains dan teknologi. Fokus tersebut selaras dengan kondisi Shanghai sebagai kota dengan populasi besar yang memberikan peluang pasar internasional dan memiliki sumber daya manusia unggul sebagai motor penggerak ekonomi dan inovasi nasional.</p> <p>Selain itu, diskusi juga mencakup isu lingkungan, khususnya terkait upaya penanggulangan polusi udara di Indonesia, terutama di wilayah Jakarta. Mr. Zang menyampaikan bahwa kualitas udara memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk mengidentifikasi secara tepat sumber utama pencemaran udara. Pemerintah diharapkan dapat menyusun kebijakan lingkungan yang komprehensif, menetapkan sanksi yang tegas, serta mendorong inovasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi guna mengurangi tingkat polusi.</p> <p>Kunjungan ini mencerminkan hubungan bilateral yang erat antara Indonesia dan Tiongkok, serta membuka peluang kerja sama yang lebih luas di berbagai bidang seperti pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan tenaga kerja, pariwisata, pendidikan, sains dan teknologi, maupun sektor-sektor strategis lainnya. Hubungan yang erat ini tidak hanya terbatas pada tingkat antarpemerintah, namun juga mencakup hubungan antarmasyarakat, antar pelaku usaha, serta antar parlemen kedua negara.</p> <p>2. <i>Hongqiao Center</i></p> <p>Delegasi Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI turut menyempatkan diri mengunjungi Hongqiao Center, pusat legislasi komunitas yang didirikan oleh Komisi Urusan Hukum Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional (NPC) Tiongkok. Menariknya, Hongqiao</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>merupakan satu-satunya kantor perwakilan legislatif lokal di Tiongkok yang didirikan pada tingkat subdistrik, serta satu-satunya yang mewakili kawasan Tiongkok timur.</p> <p>Berlokasi di barat daya Distrik Changning, Kota Shanghai, Subdistrik Hongqiao memiliki karakter yang sangat unik dan <i>modern</i>. Kawasan ini dikenal dengan tingkat internasionalisasi yang tinggi, termasuk keberadaan Komunitas Internasional Gubei yang menjadi rumah bagi warga dari lebih dari 50 negara. Selain itu, lebih dari 4.600 perusahaan berada dalam zona pengembangan ekonomi dan teknologi Hongqiao, menjadikannya pusat bisnis yang dinamis sekaligus representasi kemajuan kota global.</p> <p>Tidak hanya unggul secara ekonomi dan demografis, Hongqiao juga menjadi contoh sukses tata kelola komunitas. Dengan dukungan 16 komite lingkungan dan tokoh masyarakat teladan seperti Zhu Guoping dari Komite Lingkungan Hongchu, wilayah ini menunjukkan bahwa sistem demokrasi akar rumput dapat berjalan efektif dalam struktur sosial multikultural. Sinergi antara peran legislatif lokal dan partisipasi aktif masyarakat menjadikan Hongqiao model inspiratif dalam pengembangan komunitas.</p> <p>Kunjungan Delegasi BKSAP dipimpin oleh Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Ravindra Airlangga (Fraksi Golkar), dan Bramantyo Suwondo (Fraksi Demokrat), serta turut didampingi oleh jajaran Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Shanghai. Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam memperluas wawasan tentang praktik legislatif partisipatif dan relevan untuk diterapkan dalam konteks pembangunan demokrasi Indonesia.</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>3. <i>Shaanxi Provincial People's Congress</i></p> <p>Pimpinan Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI yang dipimpin oleh Ketua BKSAP, Dr. H. Mardani Ali Sera, M.Eng, mengunjungi <i>Shaanxi Provincial People's Congress</i>. Delegasi disambut oleh Yang Guangting, Wakil Ketua Komite Tetap <i>Shaanxi Provincial People's Congress</i>, Shaanxi (13/6/2025).</p> <p><i>Shaanxi Provincial People's Congress</i> merupakan badan penasihat utama politik di Provinsi Shaanxi, Tiongkok. Lembaga ini berfungsi sebagai lembaga politik, organisasi sosial, dan tokoh independen untuk memberikan masukan terhadap kebijakan pemerintah provinsi.</p> <p>Dalam pertemuan ini, dibahas sejumlah potensi kerja sama yang dapat dioptimalkan antara Indonesia dan Tiongkok, terutama di wilayah Provinsi Shaanxi. Potensi tersebut meliputi sektor pariwisata halal, perdagangan, produk pertanian, dan pendidikan yang diwujudkan melalui program beasiswa.</p> <p>Kedua negara sepakat bahwa pertemuan ini merupakan titik awal yang signifikan bagi kemajuan hubungan Indonesia dan Shaanxi.</p> <p>4. KBRI Beijing</p> <p>Kunjungan Delegasi BKSAP DPR RI ke Republik Rakyat Tiongkok diakhiri dengan sejumlah pertemuan di Kota Beijing. Agenda pertama pada lokasi tersebut diawali dengan pertemuan dengan Duta Besar Republik Indonesia Y.M. Drs. Djauhari Oratmangun beserta jajaran Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Beijing, pada Senin (16/6/2025).</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Pertemuan yang berlangsung di Wisma Duta Beijing tersebut berlangsung hangat seraya membahas berbagai capaian kinerja antar kedua negara serta peluang meningkatkan diplomasi multijalur guna mendukung kerja sama strategis antara Indonesia dan Tiongkok.</p> <p>5. <i>Supervisory and Judicial Affairs Committee, NPC</i></p> <p><i>Chairperson of the National People's Congress (NPC) Supervisory and Judicial Affairs Committee, Hon. Mr. Yang Xiaochao, yang sekaligus menjabat Ketua Grup Persahabatan Parlemen Tiongkok-Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak saling menyampaikan apresiasi dan berdiskusi terkait upaya mempererat hubungan antara Indonesia dan China serta peluang kerja sama yang dapat dilakukan di masa depan.</i></p> <p>Sebagai informasi, National People's Congress merupakan lembaga legislatif tertinggi di RRT yang berfungsi sebagai badan pembuat undang-undang utama dan organ kekuasaan tertinggi. Pertemuan diakhiri dengan pertukaran cinderamata dan komitmen untuk memperkuat hubungan antarparlemen.</p>	
10.	<b>KSB - BKSAP</b>	<i>Friendly Talk</i> GKSB Argentina dengan Ketua Argentina – Indonesia <i>Parliamentary Friendship Group</i> dilaksanakan tanggal 16 Juni 2025.	<p>GKSB DPR RI - Parlemen Argentina yang dipimpin oleh Martin Manurung (F-PNasdem) menerima Kunjungan Ketua Argentina - Indonesia <i>Parliamentary Friendship Group</i>, Hon. Ms. Karina Ethel Bachey di R. Diplomasi, Nus III Lt. 6 (16/06/25).</p> <p>Dalam pertemuan tersebut, GKSB DPR RI - Parlemen Argentina menyambut baik kunjungan Hon. Ms. Karina Ethel Bachey ke Indonesia guna menunjukkan komitmen penguatan kerja sama antar-parlemen Argentina - Indonesia. Ketua GKSB Argentina mengapresiasi hubungan historis antara Indonesia dan Argentina yang telah terjalin sejak tahun 1956. Pihak Indonesia dan Argentina juga menyoroti pentingnya solidaritas regional dan</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>global, khususnya di antara negara - negara Selatan Global. Dalam menghadapi ketidakpastian global yang terus meningkat, kedua belah pihak sepakat bahwa kerja sama yang erat sangat penting untuk mengatasi tantangan bersama dan mendorong pembangunan yang inklusif.</p> <p>Kedua pihak juga mendorong percepatan negosiasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA) Indonesia - Mercosur, yang melibatkan Argentina sebagai anggota Mercosur. Selain itu, dibahas pula potensi kerja sama di bidang pertanian, peternakan, pangan, pendidikan dan energi terbarukan.</p> <p>Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Anggota GKSB DPR RI - Parlemen Argentina, Heri Gunawan (F-PGERindra); Daniel Johan (F-PKB); Iman Sukri (F-PNasdem) dan Arif Rahman (F-PNasdem) serta Duta Besar Argentina untuk Indonesia, H.E. Mr. Gustavo Coppa; <i>Deputy Head of Mission, Embassy of Argentina</i>, Mr. Ignacio Lacunza.</p>	
11.	<b>KSR - BKSAP</b>	Seminar Publik: <i>the Launch of the Gender Safety Assessment Tool</i> dilaksanakan pada 19 Juni 2025.	<p>Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Dr. Mardani Ali Sera, hadir sebagai pembicara dalam seminar publik bertajuk "<i>the Launch of the Gender Safety Assessment Tool</i>" yang diselenggarakan oleh <i>Westminster Foundation for Democracy (WFD)</i> pada Kamis, 19 Juni 2025, di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta.</p> <p>Mardani menyarankan untuk membangun Kepedulian selain Proses Legislasi Permasalahan Kekerasan atas Perempuan di Politik</p> <p>Seminar ini menjadi ajang peluncuran <i>Gender Safety Assessment Tool</i>, sebuah alat penilaian risiko berbasis trauma untuk membantu institusi politik mengidentifikasi dan merespons risiko kekerasan terhadap perempuan dalam politik (<i>Violence Against Women in Politics/VAWP</i>).</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
12.	<b>KSOI - BKSAP</b>	<i>Second Parliamentary Conference on Interfaith Dialogue</i> , Roma, Italia dilaksanakan pada 19 – 21 Juni 2025.	<p>Konferensi ini merupakan tindak lanjut dari Konferensi Parlemen pertama tentang Dialog Antaragama yang diadakan di Marrakesh pada tahun 2023 dan meneruskan serta membangun semangat dan aspirasi Komunike Marrakesh.</p> <p>Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri dan Bramatyo Suwondo, didampingi oleh anggota BKSAP, Gilang Dhielafararez dan Abraham Sridjaja, bersama para perwakilan agama dan kepercayaan, organisasi berbasis agama dan organisasi masyarakat sipil lainnya, akademisi dan pakar internasional, bertemu di Roma untuk menghadiri konferensi yang diselenggarakan oleh Persatuan Antar-Parlemen dan Parlemen Italia, dengan dukungan dari <i>Religions for Peace</i>, dan berlangsung selama Tahun Yubelium yang diserukan oleh mendiang Paus Fransiskus.</p> <p>Pada pertemuan ini, para peserta memperdalam tekad dan upaya tidak hanya untuk menegaskan kembali komitmen bersama, tetapi juga untuk mengonsolidasikan tekad membangun masa depan yang damai dan menolak penyalahgunaan agama atau kepercayaan atau manipulasi terhadap pengikutnya untuk memicu kebencian dan kekerasan; baik untuk tujuan elektoral atau keuntungan politik.</p> <p>Ketika agama atau kepercayaan digunakan untuk menciptakan atau memperdalam garis kesalahan, hal itu merusak kepercayaan publik, membahayakan nyawa, dan melemahkan prinsip-prinsip martabat dan kesetaraan yang menopang masyarakat yang damai. Hal ini mengalihkannya dari kekuatan yang dimilikinya untuk membangun jembatan pemahaman dan kasih sayang serta solidaritas lintas komunitas.</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
13.	<b>KSB - BKSAP</b>	<i>Friendly Talk</i> Pimpinan BKSAP dan GKSB Spanyol dengan Delegasi Wakil Ketua Pertama Senat Spanyol dilaksanakan tanggal 20 Juni 2025.	<p>Pimpinan Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI yang dipimpin oleh Ketua BKSAP, Dr. H. Mardani Ali Sera, M.Eng menerima kunjungan Delegasi Senat Spanyol yang dipimpin oleh H.E. Mr. Javier Maroto Aranzabal, Wakil Ketua Pertama Senat Kerajaan Spanyol, Jakarta, (20/06/2025).</p> <p>Pertemuan ini turut dihadiri oleh wakil ketua BKSAP DPR RI, Ravindra Airlangga (F-PG) dan Ketua Group Kerja sama Bilateral (GKSB) DPR RI - Parlemen Spanyol, Dr. Netty Prasetiyani (F-PKS). Kedua belah pihak saling memberikan apresiasi serta memberikan penghargaan atas hubungan strategik yang telah terjalin antara Indonesia dan Spanyol.</p> <p>Pembahasan dalam pertemuan ini kemudian berlanjut pada identifikasi beberapa isu strategis, di antaranya adalah peluang perdagangan yang diharapkan dapat ditingkatkan, baik untuk <i>raw material</i> maupun produk komplementer.</p> <p>Pertemuan ini turut membahas peran Indonesia dan Spanyol dalam menjaga prinsip-prinsip Demokrasi, <i>Rule of Law</i>, serta keberpihakan pada Hak Asasi Manusia. Upaya ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memerangi terorisme dan konflik yang masih berlangsung.</p> <p>Selanjutnya, melalui pertemuan ini, diharapkan hubungan antara Indonesia dan Spanyol dapat semakin erat di masa mendatang, baik dalam kerangka diplomasi maupun hubungan bilateral secara keseluruhan.</p>	

## LAPORAN DWI MINGGUAN MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	<b>DPRD Provinsi Jambi</b>	Rapat Audiensi dilaksanakan pada hari Selasa, 10 Juni 2025.	Konsultasi terkait Penegakan Aturan Kode Etik Dewan.	
2.	<b>BK DPRD Kota Salatiga</b>	Rapat Audiensi dilaksanakan pada hari Rabu, 11 Juni 2025.	Konsultasi terkait Pembentukan SOP dalam mengatasi permasalahan kedisiplinan Anggota DPRD.	
3.	<b>DPRD Kabupaten Bandung Barat</b>	Rapat Audiensi dilaksanakan pada hari Jumat, 13 Juni 2025.	Konsultasi terkait Optimalisasi Tugas dan Fungsi Badan Kehormatan Dewan.	

## LAPORAN DWI MINGGUAN BADAN URUSAN RUMAH TANGGA

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	<b>Kunjungan Kerja Dalam Negeri</b>	Kunjungan Kerja Dalam Negeri dalam rangka keprotokolan: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tanggal 11-13 Juni 2025 ke Bandara Soekarno Hatta, Banten.</li><li>2. Tanggal 14-16 Juni 2025 ke Stasiun Pasar Turi, Surabaya, Jawa Timur.</li><li>3. Tanggal 17-19 Juni 2025 ke Bandara Kertajati, Majalengka, Jawa Barat.</li><li>4. Tanggal 20-22 Juni 2025 ke Bandara Kualanamu, Sumatera Utara.</li></ol>	Kunjungan Kerja Dalam Negeri BURT DPR RI dalam rangka pengawasan pelaksanaan keprotokolan di bandar udara/stasiun untuk: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Memastikan pelaksanaan keprotokolan sesuai ketentuan peraturan.</li><li>2. Meninjau ketersediaan dan kesiapan sarana/prasarana di bandar udara/stasiun agar pelaksanaan keprotokolan berjalan lancar.</li></ol>	

## LAPORAN DWI MINGGUAN BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	<b>Kedutaan Besar Republik Ekuador di Jakarta</b>	<i>Courtesy Call</i> dilaksanakan pada hari Senin, 16 Juni 2025.	<p><i>Courtesy Call</i> Duta Besar Republik Ekuador kepada BAKN DPR RI dipimpin oleh Ketua BAKN DPR RI, Ir. Andreas Eddy Susetyo, M.M, didampingi oleh Wakil Ketua BAKN, Habib Idrus Salim Aljufri, Lc., M.B.A., Adapun Duta Besar Republik Ekuador, Luis Guillermo Arellano Jibaja, didampingi oleh <i>Deputy Head of Mission</i>, Pablo Bonifaz.</p> <p>Kesimpulan hasil <i>courtesy call</i> antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <i>Courtesy Call</i> ini dilaksanakan atas inisiatif Duta Besar Republik Ekuador di Jakarta berkenaan dengan rencana kunjungan kerja BAKN DPR RI di Republik Ekuador yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 s.d. 21 Juli 2025.</li> <li>2) Dubes Ekuador menyampaikan bahwa Indonesia dan Ekuador baru saja merayakan 45 tahun hubungan bilateralnya pada tanggal 29 April lalu, Ekuador membuka kedutaan besar di Jakarta pada tahun 2004 sedangkan Indonesia membuka kedutaan besarnya di Quito pada tahun 2010.</li> <li>3) Dubes menyatakan komitmennya untuk terus meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dan Ekuador, bukan hanya dalam bidang politik, tetapi juga perdagangan, pendidikan, dan sektor strategis lainnya.</li> <li>4) Delegasi BAKN berencana melaksanakan kunjungan kerja ke Quito pada tanggal 15-21 Juli 2025 untuk melakukan pertemuan dengan <i>Public Accounts Committee</i> Parlemen Ekuador dan Badan Audit Nasional Ekuador.</li> </ol>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>5) Duta Besar Republik Ekuador di Jakarta beserta jajaran menyambut baik rencana kunjungan tersebut dan menyampaikan kesiapan penuh untuk memberikan dukungan dan memfasilitasi kebutuhan yang diperlukan dalam proses persiapan kunjungan agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar.</p> <p>6) Pimpinan BAKN mendapatkan informasi mengenai hal-hal menarik yang dapat dijadikan referensi selama kunjungan kerja BAKN DPR RI di Republik Ekuador, termasuk potensi destinasi budaya dan alam, kegiatan ekonomi strategis, serta peluang kerja sama yang relevan dan dapat mendukung penguatan hubungan bilateral antara Indonesia dan Ekuador.</p>	

## LAPORAN DWI MINGGUAN BADAN ASPIRASI MASYARAKAT

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	-	<p><i>Focus Group Discussion (FGD)</i> dengan tema “Persiapan Menuju Festival Aspirasi yang Inklusif dan Partisipatif dan Narasumber: Agustina Iskadar Crombach (<i>Head of Citizen OS Indonesia</i>) dilaksanakan pada hari Jumat, 20 Juni 2025, pukul 10.00 WIB.</p>	<p>1. <i>Citizen OS</i> Indonesia menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:</p> <p>b. <i>Citizen OS</i> adalah organisasi non-pemerintah dan nirlaba yang menyediakan <i>platform</i> kolaboratif untuk diskusi dan pembuatan keputusan publik melalui peningkatan kesadaran tentang keterlibatan masyarakat secara <i>online</i> melalui proyek demokrasi digital (<i>e-democracy</i>). Penggunaan <i>platform</i> ini memastikan bahwa suara masyarakat Indonesia dapat disampaikan, tanpa harus hadir langsung ke Jakarta.</p> <p>c. Pelaksanaan festival aspirasi pada tahun lalu telah berjalan dengan baik dan telah melibatkan banyak sekali komunitas, termasuk di dalamnya adalah kelompok penyandang disabilitas.</p> <p>d. Terkait dengan tema kegiatan pada Festival Aspirasi 2025 akan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari masukan yang masuk di <i>platform</i> yang dikembangkan oleh <i>Citizen OS</i> Indonesia sebagai saluran untuk menjaring aspirasi masyarakat Indonesia</p> <p>e. Kegiatan <i>Indonesia Opinion Festival (IOF)</i>/Festival Aspirasi pada Desember 2024 telah memberikan kesan yang luar biasa bagi para peserta, terutama dari</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>kelompok penyandang disabilitas karena kegiatan ini memberikan bukti bahwa DPR RI memberikan kesempatan bagi berbagai kelompok masyarakat untuk menyampaikan pendapat secara langsung melalui forum yang diselenggarakan di Gedung DPR RI.</p> <p>f. Adapun pada agenda Festival Aspirasi 2025 mendatang, <i>Citizen OS</i> Indonesia memiliki target melibatkan sebanyak 300 relawan, 150 kelompok 6.000 peserta yang hadir secara <i>online</i>, dan 4.000 peserta <i>offline</i>. Namun jumlah tersebut dapat disesuaikan dengan anggaran yang tersedia dari BAM DPR RI, termasuk dengan mempertimbangkan kapasitas tempat pelaksanaan festival aspirasi.</p> <p>g. <i>Citizen OS</i> Indonesia berharap agar pada Festival Aspirasi 2025 mendatang dapat mengusung tema-tema yang aktual karena masyarakat memiliki harapan besar kepada DPR melalui BAM, misal terkait dengan isu-isu RUU PPRT, RUU Perampasan Aset, kekerasan perempuan, kekerasan pada anak maupun tema lainnya yang aktual di tengah masyarakat yang kemudian dapat tertuang dalam kebijakan-kebijakan pemerintah.</p> <p>h. Untuk memastikan pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik, maka perlu disusun terlebih dahulu nota kesepahaman antar para pihak terkait dengan tugas, fungsi, dan kewajiban, dari masing-masing pihak yang terlibat dalam Festival Aspirasi 2025.</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>i. Dalam melaksanakan kegiatan serap aspirasi/isu di daerah-daerah, <i>Citizen OS</i> Indonesia selalu bekerja sama dengan komunitas-komunitas lokal untuk menjangkau kelompok-kelompok masyarakat dalam rangka meningkatkan partisipasi publik dalam menyampaikan aspirasi.</p> <p>2. Sekretariat dan Tenaga Ahli BAM DPR RI menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:</p> <p>a. Bahwa FGD yang dilaksanakan pada 20 Juni 2025 ini merupakan koordinasi awal antara sekretariat BAM DPR RI dengan <i>Citizen OS</i> Indonesia dalam rangka persiapan pelaksanaan Festival Aspirasi 2025 yang nantinya akan dijadikan sebagai agenda tahunan BAM DPR RI.</p> <p>b. Pelaksanaan kegiatan Festival Aspirasi 2025 diharapkan dilaksanakan di waktu yang tidak terlalu mepet agar persiapannya bisa berjalan dengan optimal. Jika pelaksanaan digelar pada akhir tahun, maka akan diupayakan dilaksanakan di masa sidang agar lebih banyak anggota BAM DPR RI yang dapat berpartisipasi dalam acara tersebut.</p> <p>c. <i>Citizen OS</i> berkewajiban untuk menjaring kelompok-kelompok masyarakat yang akan diundang/dilibatkan dalam Festival Aspirasi 2025, termasuk dalam pemilihan isu-isu yang tengah berkembang di masyarakat.</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>d. Proses kurasi isu/aspirasi yang akan diangkat dalam Festival Aspirasi 2025 perlu mempertimbangkan berbagai hal, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan dapat menyerap aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat di berbagai daerah di Indonesia yang memiliki tantangan geografis.</li> <li>2) Memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan dapat menjadi saluran bagi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses untuk menyampaikan aspirasi.</li> <li>3) Memastikan bahwa isu-isu yang diusung dalam Festival Aspirasi 2025 tidak hanya berasal dari kanal <i>platform</i> yang disediakan oleh <i>Citizen OS</i> Indonesia, tetapi juga isu-isu beragam yang sudah masuk dan dibahas oleh BAM DPR RI.</li> </ol> <p>e. Untuk mengoptimalkan persiapan pelaksanaan Festival Aspirasi 2025 perlu ada komunikasi dan kolaborasi intensif yang melibatkan Sekretariat dan Tenaga Ahli BAM DPR RI serta <i>Citizen OS</i> Indonesia. Adapun terkait dengan waktu dan tempat pelaksanaan Festival Aspirasi 2025 akan diputuskan kemudian.</p> <p>3. PPK Biro Persidangan II DPR RI menyampaikan bahwa untuk mengoptimalkan penyelenggaraan acara Festival Aspirasi 2025, perlu segera disiapkan rencana anggaran</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>yang memadai sehingga dapat mengakomodir kebutuhan penyelenggaraan acara dimaksud.</p> <p>4. BKSAP DPR RI menyampaikan bahwa perlu disepakati skema konsultan perencanaan dan konsultan pengawas dalam rangka menjadikan acara Festival Aspirasi 2025 berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aturan yang berlaku.</p> <p>5. Biro Pemberitaan DPR RI menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan Festival Aspirasi 2025 perlu memperhatikan isu-isu yang masih menjadi pembahasan dalam prolegnas dan bukan isu-isu yang terlalu sensitif. Adapun BAM DPR RI harus berperan pada isu-isu substantif yang selanjutnya dapat diteruskan ke AKD terkait.</p>	

\*\*\*\*\*